

**RESPON PEMANGKU ADAT DI KABUPATEN GOWA TERHADAP
PERDA LAD NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN
LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA DAERAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Politik (SIP.) Jurusan Ilmu Politik
Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SUNARDI

NIM. 30600112065

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

MOTTO

**HIDUP ADALAH TANTANGAN DAN BEBAN , JIKA ITU HANYA DI PIKIRKAN , MAKA
MENJADI ANGAN-ANGAN BELAKA, MELANGKAHLAH DAN TAKLUKKAN TANTANGAN MAKA
KEBAHAGIAN MENGHAMPIRIMU BEBAN AKAN PERGI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, " Respon Pemangku Adat Di Kabupaten Gowa Terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat dan Budaya Daerah " yang disusun Oleh SUNARDI, NIM: 30600112065, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan)


Makassar, 28 Juli 2017

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Abdullah , M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Syahril Karim, M.Si, Ph.D	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Muh. Saleh Tajuddin, MA	(.....)
Prmbimbing II	: Ismah Tita Ruslin, S.Ip,.M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan
Pendidikan UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 1959074 1 98903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNARDI
Nim : 30600112065
Tempat/Tgl. Lahir : MAKASSAR, 17 JUNI 1993
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Alamat : Jl. Pannara (Antang)
Judul : Respon Pemangku Adat Di Kabupaten Gowa Terhadap Perda LAD
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Februari 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Penyusun,



SUNARDI

Nim: 30600112065

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Atas berkat dialah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi untuk lebih menambah pengetahuan dan pengalaman di sebuah Universitas. Terimakasih atas nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat kasih sayang dan begitu banyak nikmat Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kami Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, takhenti-hentinya Allah SWT melimpahkan beragam nikmatnya dan dibawah bimbingan para pendidik sehingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

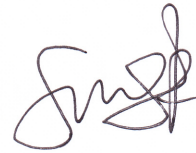
1. Prof. DR. H. Musafir Pababari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, beserta para wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

3. Kepada Dr. Syarifuddin Jurdi.,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Politik, serta Syahrir Karim, S.Ag., M.Si., Ph.D.selaku sekretaris jurusan.
4. Kepada pembimbing skripsi Prof. Dr. Muh. Saleh Tajuddin, MA, selaku Konsultan I dan Ismah Tita Ruslin, S.Ip.,M.Si selaku Konsultan II, yang selama bimbingan banyak memberi saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar beserta staf Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu mengarahkan penulis hingga taraf penyelesaian.
6. Kepada kedua Orang Tua yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dan yang selalu memberikan dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya, Kasih sayang-Nya, dan Maghfirah-Nya kepada keduanya.
7. Terimah kasih pula untuk Aprilia Damayanti S.Pd yang telah memberikan semangat dan banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik terkhusus Fauzi Hadi Lukita S.Ip, Ardiansyah S.Sos, Rahmat Ilmi Tella S.Ip, Sri Maulinda S.Sos Suhardi S.Sos Hasbar, Ardi Rohmanto, Aidil, Ayyub, serta seluruh teman-teman Ilmu Politik angkatan 2012 dan teman-teman KKN yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin.

Makassar, 22 Februari 2017



SUNARDI
30600112065



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL	
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	30
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
A. Gambaran umum Kabupaten Gowa	31
B. Sejarah Gowa	44
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Respon Pemangku Adat Terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat dan Budaya Daerah Kabupaten Gowa.....	52
B. Dilematis Aparatur Birokrasi dalam merespon perda LAD....	62
C. Faktor – faktor yang Menimbulkan Konflik di Kabupaten Gowa dengan Lahirnya LAD.....	65
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

ABSTRAK

NAMA : SUNARDI

NIM : 30600112065

**JUDUL : Respon Pemangku Adat Di Kabupten Gowa Terhadap Perda LAD
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah**

Skripsi ini berjudul Respon Pemangku Adat Di Kabupten Gowa Terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah. Adapun rumusan masalah ialah Bagaimana Respon pemerintah dan pemangku Adat di Kabupaten Gowa terhadap terbitnya Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan budaya Daerah, Apa Faktor-faktor yang Menimbulkan Konflik Di Kabupaten Gowa dengan terbitnya Perda LAD di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang mnghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan literature pustaka. Teknik analisis data deskriptif di mana jenis data yang terbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Adapun Teori yang di gunakan Teori Kekuasaan, Teori Elit Politik, Teori Konflik, Teori Respon.

Hasil penelitian, respon pemerintahan terhadap Lahirnya perda LAD menimbulkan berbagai pro dan kontra antara keluarga kerajaan dan pemerintah daerah, meski terjadi pro dan kontra Pemerintahan tetap setuju atas perda LAD dan menjalankan Perda sesuai dengan apa yang telah disahkan. LAD mengakibatkan terjadinya kondisi dilematis bagi beberapa aparatur birokrasi pasalnya di satu sisi kontra dengan LAD namun di sisi lain tak mampu berbuat banyak dikarenakan harus tunduk dan patuh terhadap atasan (bupati). Respon pemangku Adat dan Budaya Kabupaten Gowa menyatakan bahwa Perda LAD ini tidak layak untuk diterapkan sebagaimana keinginan dari pemerintahan Kabupaten Gowa.

Hal yang paling utama atas penolakan dan akar terjadinya konflik di Kabupaten Gowa adanya Kata *Sombayya/Raja* . Konflik yang terjadi dengan Lahirnya LAD di picu dari pihak pemerintahan Gowa . Melihat konflik yang terjadi di Kabupaten Gowa menyangkut persoalan *siri'* kubu keluarga kerajaan serta pemangku adat Kabupten Gowa merasa *nipakasiri'* (Permalukan) sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap Pemerintahan Kabupaten Gowa dan merasa bahwa mereka tidak dihargai dengan lahirnya Perda LAD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang nomor 44 tahun 1950 Peraturan daerah (perda) Gowa terbentuk sebagai daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dan membentuk 13 daerah Indonesia bagian Timur. Sejarah pemerintahan daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undangundang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar. Pada 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II. Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia, maka 18 Januari 1957 dibentuk daerah-daerah tingkat II .

Berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat no. 2 tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor U.P/7/2/24, 6 Pebruari 1957 yang mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) daerah

bawahan distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator, masing-masing adalah sebagai berikut .

- 1) Koordinator Gowa Utara, meliputi: Distrik Mangasa, Tombolo, Pattallasang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatonya berkedudukan di Sungguminasa.
- 2) Koordinator Gowa Timur, meliputi: Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino.
- 3) Koordinator Gowa Selatan, meliputi: Distrik Limbung dan Bontonompo. Koordinatonya berkedudukan di Limbung.
- 4) Koordinator Gowa Tenggara, meliputi: Distrik Malakaji, koordinatonya berkedudukan di Malakaji.

Desentralisasi dalam UU no. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.¹Desentralisasi juga dapat di artikan sebagai kebalikan dari konsentrasi di pusat dan pemberian kekuasaan kepada pemerintahan lokal. Dalam studi ilmu politik, desentralisasi merujuk adanya pendistribusian kekuasaan.Desentralisasi menuntut adanya pembagian wilayah-wilyah yang lebih kecil lagi di dalamnya tercipta intitusi politik dan administrasi.

¹Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal* (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h.2

Selanjutnya desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari keharusan bagi adanya pemencaran kekuasaan. Seiring dalam struktur pemerintahan nasional yang tersedia, diciptakan suatu badan tersendiri yang dijamin oleh hukum dan terpisah oleh pusat. Dalam badan ini, perwakilan daerah dijamin kekuasaannya untuk menentukan sejumlah persoalan umum yang ada berada dalam kawasannya tanpa campur tangan pusat. Basis politik yang menopang tegaknya badan ini bersifat lokal, bukan nasional. Dengan demikian pula, wilayah kekuasaan badan terpisah dari pusat ini juga bersifat terbatas. Akan tetapi sejauh ini menyangkut masalah wilayah yang bersangkutan badan ini dijamin haknya oleh hukum dan perundang-undangan untuk membuat keputusan.

Kemudian Desentralisasi melahirkan suatu pemerintahan lokal otonomi daerah dan otonomi daerah salah satu bentuk dari praktek demokrasi. Lahirnya Undang-Undang No. 32/2004 mengenai otonomi daerah, memungkinkan konsep pemerintahan desa dengan konsep pemerintahan adat hal ini dikuatkan lagi dengan dihasilkannya amandement kedua UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) Bab VI bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, kemudian dipertegas lagi Pasal 28 I Bab X A yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sebagai hak asasi manusia. Otonomi daerah menjadikan masyarakat lokal mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk melakukan kreasi sesuai dengan tradisi-tradisi yang berkembang di daerahnya. Tingginya tingkat fragmentasi lokal menuntut demokrasi lokal untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang

dihadapi lokal secara universal dalam arti pemerintah dan masyarakat lokal bertanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri. Demokrasi lokal merupakan salah satu media untuk mewujudkan peran aktif masyarakat lokal.²

Kewenangan membuat peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.³

Pengertian “bertentangan dengan kepentingan umum” dalam hal ini adalah kebijakan yang berakibat, terganggunya kerukunan antara warga masyarakat, terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya ketenteraman/ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Perda yang ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan

² Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal* (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h.113

³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) h.131-132

yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintahan pusat dan hal dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat.

Proses dalam pembentukan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini, dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat ini di dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.⁴

Sebuah Perda yang telah sah tentu telah banyak melewati beberapa tahap tentang proses bagaimana menentukan dan membuat perda dimulai sejak rancangan hingga sampai pada perda disahkan dan tentu menimbulkan banyak permasalahan dan evaluasi yang panjang, seperti misalnya perda tentang LAD (Lembaga Adat Daerah) yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa isi pada Ranperda tentang LAD bahwa Bupati disebut sebagai raja, rancangan perda ini menimbulkan berbagai komentar mulai dari masyarakat awam, keturunan raja, lembaga adat Gowa. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang susunan kedudukan Lembaga Adat Daerah (LAD) di Kabupaten Gowa, dalam hal ini timbul suatu pertentangan tentang gagasan perda.

Dengan adanya pertentangan dan perbedaan pendapat tentu banyak hal yang harus menjadi pokok dalam sebuah masalah dan sebaiknya dapat melihat suatu pandangan islam tentang sebuah pertentangan dan agar mampu membuat sebuah

⁴Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) h.133

solusi tepat, terdapat dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang sebuah perbedaan pendapat tercantum dalam surah An-nisa ayat 59.

Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁵

Makna dalam ayat tersebut menegaskan tentang bagaimana melihat sebuah perbedaan pendapat dan jika hal itu menuju kepada kebaikan atau kepentingan orang banyak dan sesuai maka taatilah.

Ranperda tentang LAD ini menuai berbagai pro dan kontra secara tegas ditolak oleh keluarga besar Kerajaan Gowa. Menurut keluarga kerajaan akan teruskan bila pemerintah daerah mencoba mengagas Ranperda yang mengatur kedudukan dan status raja dalam pemerintahan.⁶

⁵Al-Qur'an Dan Terjemahan, *Toha Putra*, (Semarang:PT. Toha Putra, 2007)

⁶*Tribunnews*, Penolakan Terhadap Ranperda LAD oleh Keluarga Kerajaan, Diakses Pada Tanggal 10/08 /16 Pukul 23.00

Berdasarkan Ranperda atau perda LAD di Kabupaten Gowa terdapat beberapa pasal yang menghasilkan kontroversi atau pro dan kontra di masyarakat diantaranya pasal tentang kedudukan ketua LAD dan posisi kerajaan atau Bangsawan Gowa dalam perda tersebut.⁷

Perselisihan antara keluarga Kerajaan dan pemerintah mengenai perda terus berlanjut dan Adapun dalam ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang perselisihan dan perbedaan pendapat terkandung dalam dalam surah Al-Anfal:46

Allah berfirman dalam surat Al-Anfal: 46:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيكًا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahan:

*“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*⁸

Berdasarkan ayat tersebut di atas menjelaskan perselisihan dalam mengemukakan pendapat, dan dengan ayat tersebut diatas kemudian bisa dijadikan sebagai jalan tengah dalam permasalahan yang muncul dengan terbitnya perda tentang LAD menimbulkan berbagai perselisihan tentang memahami isi dari Perda tentang LAD Bupati disebut sebagai Raja

Ranperda tentang LAD ini adalah mengejar atau menginginkan sebuah jabatan atau gelar Raja. Dalam islam pun,terdapat hadis yang membahas atau

⁷Tribunnews, Penolakan Terhadap Ranperda LAD oleh Keluarga Kerajaan, Diakses Pada Tanggal 10/08 /16 Pukul 23.00

⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahan, Toha Putra, (Semarang:PT. Toha Putra, 2007)

mengamalkan tentang sebuah keinginan dalam hal jabatan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, 1650, dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَا إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

Artinya:

Abu said (abdurrahman) bin samurah r.a. Berkata: Rasulullah saw telah bersabda kepada saya : ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau diserahi jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. (bukhory, muslim).⁹

Hadis ini menjelaskan tentang sebuah kedudukan bahwa janganlah mengejar sebuah kedudukan janganlah meminta sebuah jabatan karna akan lebih mulia ketika diserahi jabatan tanpa meminta. Sedangkan Perda tentang LAD ini dalam isinya meminta sebuah kedudukan dan jabatan yakni bahwa selain mendapat jabatan sebagai seorang Bupati, maka secara otomatis menyanggah gelar sebagai Raja.

⁹ Islamislogic.wordpress.com/kumpulan-hadis-shahih/40-hadis-tentang-pemimpin, Diakses Pada Tanggal 29/08/ 16 Pukul 23.00

Dari beberapa penolakan Perda tentang LAD yang telah menimbulkan pro dan kontra Perda pun direvisi, hasil revisi bahwa kata raja diubah menjadi kata *sombayya* dengan kata lain kedudukan di atas raja. Hingga pada akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lembaga Adat Daerah (LAD) resmi disahkan sebagai Perda, pada tanggal 15 Agustus 2016. Perda LAD tersebut disahkan dalam rapat paripurna, Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang penataan Adat dan Budaya Daerah di Kabupaten Gowa yang dihadiri langsung oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta IYL, Ketua DPRD Gowa, Anzar Zainal Bate, pimpinan dewan dan beberapa anggota DPRD.

Dengan disahkannya Perda itu, Adnan pun kini disebut juga sebagai *Somba* atau dengan kata lain berkedudukan diatas Raja. Hal itu sesuai hasil revisi naskah Perda pada Bab III pasal 3 yang menjelaskan jika Bupati Gowa adalah Ketua Lembaga Adat yang juga berperan menjalankan fungsinya sebagai Somba.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa, Anzar Zainal Bate, menegaskan yang dilakukan hingga sampai pada pengesahan Perda LAD sesuai dengan peraturan yang ada. Mekanismenya, sebelum ditetapkan itu di konsultasikan ditingkat 1 setelah itu ditetapkan di DPRD kemudian dinomor registrasikan kembali menjadi lembaran peraturan daerah.¹⁰

Perda LAD ini diterbitkan dengan tujuan sebagai pelestari budaya dengan masuknya arus global yang mampu mempengaruhi dan melihat tantangan yang

¹⁰*Tribunnews*, tak bisa jadi raja gowa kini adnan sah jadi somba Gowa, Diakses 10/08/16.
Pukul 23.00 Wita

kompleks mengenai adat dan budaya. Namun disisi lain perda ini menekankan bahwa ketua LAD ini sembari menjadi ketua dan secara langsung menjalankan fungsi-fungsi *sombayya*, hal ini yang menimbulkan kecaman dan konflik yang terjadi atas perda LAD ini, setelah pengukuhan Ketua LAD dan menjalankan fungsi *sombayya ri* Gowa. Pro dan kontra pun terjadi setelah pengukuhan dan menjalankan Perda LAD ini, konflik antara keluarga Kerajaan dan Pemerintah pun terjadi .

Berdasarkan pada uraian di atas dalam latar belakang tersebut, membuat penulis tertarik mengangkat judul :Respon Pemangku Adat Kabupaten Gowa Terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah , dalam hal melestarikan budaya di Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah Respon Pemerintah dan Pemangku Adat di Kabupaten Gowa Terhadap Lahirnya Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah?
2. Faktor-faktor Yang Menimbulkan Konflik Terkait Dengan Terbitnya Perda LAD di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Disahkannya perda tentang LAD Bupati disebut sebagai *Somba* tentu banyak menimbulkan pandangan dan pendapat serta permasalahan mengenai Perda tersebut, oleh karena itu penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui respon Pemerintah dan Pemangku adat di Kabupaten Gowa terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat dan Budaya Daerah .
- b. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab konflik yang terjadi dengan terbitnya Perda LAD.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini berguna dalam hal menambah pengetahuan dan membuka wawasan dan belajar memahami sebuah permasalahan dari beberapa fenomena yang ada serta menambah nilai akademik serta Pengetahuan tentang bagaimana proses dari Ranperda hingga sah menjadi perda dengan melihat beberapa polemik yang terjadi di Kabupaten Gowa.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

1. Penelitian Agus Jaelani Mursidi dalam Tesis: Keberadaan Lembaga Adat Dalam Konsep Otonomi Desa Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi tentang Lembaga Adat “Perdikan” di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang).

Penelitian ini melihat adat kebiasaan yang berkembang di desa Wonobodro dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pula adanya konsep otonomi desa dalam kerangka otonomi daerah perlu kiranya Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan peran sertanya dalam memberdayakan dan melestarikan serta mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat “perdikan” di desa Wonobodro, sehingga prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip seluas-luasnya dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusannya termasuk kebijakan-kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Penulis menjadikan hasil penelitian di atas sebagai tinjauan pustaka karena dianggap memiliki kesamaan pembinaan dan peran sertanya dalam memberdayakan dan melestarikan serta mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat “perdikan” di desa Wonobodro. Perbedaan dari penelitian sebelumnya bahwa penelitian yang akan dilakukan lebih melihat kepada respon Masyarakat terhadap salah satu Perda di Kabupaten Gowa ,Perda LAD tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah di Kabupaten Gowa dan melihat perbedaan-perbedaan pembinaan dalam

¹¹Agus Jaelani Mursidi, Keberadaan Lembaga Adat Dalam Konsep Otonomi Desa Sesuai Dengan Undang-undang Nomor SS32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi tentang Lembaga Adat “Perdikan” di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batan) *TESIS*, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005

Perda LAD yang berada di Kabupaten Gowa dengan melihat adanya polemik yang terjadi dengan adanya Perda LAD.

2. Tulisan A. Zarkasi dalam jurnal Ilmu Hukum berjudul : (Pengawasan Dalam Peraturan Daerah)

Penelitian ini mencakup permasalahan tentang pengawasan terhadap perda karena daerah-daerah memiliki otonomi luas tidaklah berarti daerah tersebut bebas melaksanakan kewenangannya, dan tetap dilakukan pengawasan dari pemerintah, sebagaimana pendapat Bagir Manan : Pengawasan (*toezicht, supervision*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di suatu pihak dan pengawasan di pihak lain, merupakan dua sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi (desentralisasi). Kebebasan dan kemandirian berotonomi dapat dipandang sebagai pengawasan atau kendali terhadap kecenderungan sentralisasi yang berlebihan. Sebaliknya pengawasan merupakan kendali terhadap desentralisasi berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa sistem pengawasan. Pengawasan dimaksud termasuk pengawasan oleh pemerintah terhadap Peraturan Daerah. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pengawasan pemerintah oleh Perda LAD di Kabupaten Gowa masalah Perda dan yang membedakan penelitian sebelumnya lebih terfokus pada masalah

terhadap suatu Perda adanya pertentangan antara Pemerintah Kabupten Gowa dengan Keluarga Kerajaan .¹²

3. Penelitian Rudyanto dalam skripsinya berjudul : Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pembahasan skripsinya mencakup masala Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan penyelenggaraan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Hasil penelitian tersebut di atas yakni mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan : “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Kesamaan dari penelitian yang telah dilakukan tentang bagaimana hubungan Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang bagaimana Perda ini berjalan dan sesuai dengan tujuannya dan meminta pendapat terhadap perda. Perbedaan, penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada proses menciptakan sebuah perda dan melihat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan penelitian yang akan dilakukan lebih kepada perda yang telah disahkan dan akan diterapkan

¹²A. Zarkasi, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah, *Jurnal Ilmu hukum*, vol 3 , Nomor 2, Agustus-Oktober 2014. Diakses 11/09/19. Pukul 23.30 Wita

namun memunculkan permasalahan yang berujung konflik yang telah terjadi di Kabupaten Gowa.¹³

4. Penelitian Hasni Rabbi dalam Skripsinya berjudul; “Hubungan Lembaga Adat Dengan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan di Tana Toraja”.

Dalam skripsinya membahas Lembaga Adat sebagai salah satu sub sistem juga telah menjalankan tugas dan fungsinya. Lembaga adat memiliki peran untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan, dalam hal ini pembuatan Perda. Peran tersebut telah dijalankan oleh pengurus Lembaga Adat atau Tongkonan yang ada di Tana Toraja. Lebih rinci peran yang dijalankan lembaga adat adalah ikut membahas rancangan Perda, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Adat. Lembaga Adat memberikan masukan atau kritikan terhadap suatu rancangan Perda pada saat perumusan. Proses tersebut dilakukan dengan cara DPRD mengundang pihak lembaga adat, atau terkadang pihak DPRD yang berkunjung ke Lembaga Adat.

Lembaga Adat atau Tongkonan sebagai salah satu kelompok kepentingan bertugas untuk menampung saran (kritikan atau masukan) dari anggotanya (masyarakat adat) untuk kemudian disampaikan kepada lembaga politik yang berada dalam suprastruktur politik. Lembaga Adat atau Tongkonan telah mewakili masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan. Lembaga Adat

¹³Rudyanto , Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat, *Skripsi*, (Padang: Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2012). h.8

di Tana Toraja memberikan kritikan dan masukan dalam pembuatan suatu Perda kepada DPRD. Jadi, hubungan antara Lembaga Adat atau Tongkonan dengan DPRD di Tana Toraja.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan bagaimana melihat hubungan antara Pemerintah dengan Lembaga Adat yang ada . sedangkan yang membedakan penelitian ini melihat hubungan suatu lembaga adat dengan DPRD dalam hal melihat Perda LAD yang telah disahkan oleh DPRD serta hubungan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan Lembaga Adat yang ada . Penelitian sebelumnya melihat tentang hubungan kerja sama antara lembaga adat yang ada di tanah Toraja.

5. Kamaruddin dalam Jurnal Ilmu Hukum : Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat

Tulisan ini membahas tentang muncul klaim bahwa praktek penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat adalah mediasi tetapi pada tataran realitasnya menunjukkan ada perbedaan dalam prinsip dan prosedur yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam konflik yang sering terjadi dalam masyarakat Aceh dan melihat pola kerjasama yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik serta siapakah diantara mereka yang paling dominan dalam menyelesaikan konflik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa lembaga adat telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam

¹⁴Hasni Rabbi, Hubungan Lembaga Adat Dengan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan di Tana Toraja, *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Politik, fisipol, Unhas, 2012). h. 69

menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat Aceh. Meskipun semua unsur lembaga adat terlibat dalam menyelesaikan konflik tetapi dalam proses penyelesaian konflik untuk tingkat *gampong*, *keuchik* menduduki peran yang sangat penting dan strategis.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan tentang pembahasan mengenai Lembaga Adat sedangkan yang yaitu dalam penelitian ini menyebutkan bahwa lembaga Adat sebagai mediasi dalam menyelesaikan konflik sedangkan yang membedakan Konflik di Kabupaten Gowa ini merupakan Konflik antara Pemerintah dan keluarga Kerajaan atau dalam hal lain Lembaga Adat jika penelitian cenderung melihat bahwa lembaga adat sebagai alat mediasi dan penelitian yang akan dilakukan tentang hubungan lembaga adat Kabupaten Gowa dengan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan terbitnya Perda LAD di Kabupaten Gowa.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Respon

1. Definisi Respon

Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau

¹⁵Kamaruddin, Model Penyelesaian Konflik, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 21, No 1, Mei 2013.

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.¹⁶

Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator.¹⁷

Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi dengan adanya respon yang disampaikan.¹⁸ Dari komunikasi kepada komunikator maka akan menetralkan kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi. Sedangkan menurut Poerdawarminta, respon diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban.¹⁹ Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah terjadinya serangkaian komunikasi. Para ahli dalam menafsirkan respon antara satu dan lainnya berbeda. Tetapi walaupun para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan tanggapan, kesemuanya memiliki titik kesamaan.

2. Faktor Terbentuknya Respon

¹⁶ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999. Hal.51

¹⁷ Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenarjo, *Himpunan Istilah Komunikasi*, Yogyakarta: Liberty. 1983. Hal.25

¹⁸ Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Bulan Bintang. 1982. Hal.50

¹⁹ Bimo Walsito, *Psikologi Umum*, Yogyakarta: UGM. 199. Hal.55

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri.

Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, yaitu :²⁰

a. Faktor Internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan

²⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya 1999. Hal 118

fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan

3. Macam-macam Respon

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut Steven M. Chaferespon dibedakan menjadi tiga bagian :

- a. Kognitif : yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
- b. Afektif : yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
- c. Konatif (Psikomotorik) : yang dimaksud dengan psikomotorik adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti melihat tentang

respon pemerintah dan pemangku adat. Dengan menggunakan teori respon agar memudahkan dalam melihat realitas yang terjadi dengan terbitnya LAD serta melihat faktor internal dan eksternal dalam pro dan kontra yang terjadi di Kabupaten Gowa.

2. Teori Kekuasaan

Di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik khususnya. Malahan pada suatu ketika politik (*politics*) dianggap identik dengan kekuasaan. Telah muncul begitu banyak definisi lain sehingga beberapa ahli, seperti W. Connolly dan S. Lukes menganggap kekuasaan suatu konsep yang di pertentangkan (*a contested concept*) yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapai suatu consensus. Perumusan yang umumnya dikenal ialah bahwa kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seseorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan. Dalam perumusan ini pelaku bisa berupa seorang, kelompok orang, atau suatu kolektivitas. Jadi, umpamanya A mempunyai kekuasaan atas B, jika A dapat menyebabkan B bertindak sesuai keinginan A. Dalam hal ini diasumsikan bahwa B sebenarnya mempunyai niat lain daripada yang dikehendaki A. Kekuasaan selalu berlangsung antara sekurang-kurangnya dua pihak, jadi ada

hubungan (*relationship*) antara dua pihak atau lebih.²¹ Talcott Parson yang cenderung melihat kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat di dukung oleh sanksi negatif.

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang dan legitimasi seperti dengan konsep kekuasaan, disinipun bermacam-macam perumusan yang ditemukan. Perumusan yang mungkin paling mengenai sasaran adalah definisi yang di kemukakan oleh Robert Bierstedt dalam karangannya *Analysis of social power* yang mengatakan bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *power and society* bahwa wewenang adalah kekuasaan formal. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk , mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan.

Apabila Negara dipahami sebagai suatu manifestasi kehendak umum dengan berbagai kelembagaannya seperti pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), maka obyek pembahasan ilmu politik berikutnya selalu aktual yakni mengenai kekuasaan.²² Konsep kekuasaan mempunyai sifat yang mendasar dalam

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 59

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 63-64

ilmu social pada umumnya, dan ilmu politik pada khususnya. Sebagai kalangan mengidentikkan bahwa politik (*politics*) adalah kekuasaan itu sendiri , meski ilmu politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan semata, tetapi kekuasaan telah menjadi gejala sentral dalam ilmu politik dan terus menjadi sesuatu yang selalu hangat diperdebatkan. Dalam sejumlah kajian para ilmuan politik, kekuasaan telah ditafsir secara beragam khususnya berkaitan dengan hakikat kekuasaan, namun secara umum, kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan .

Kekuasaan dengan menjamin Almond dan Genco sebagai bagian dari aktivitas yang berkaitan dengan kajian tentang pengaruh dan orang yang berpengaruh. Ilmu politik menyatakan syarat, sedangkan filsafat politik membenarkan pilihan. Lasswell menyebutkan bahwa ilmu politik hanya menentukan syaratnya dan tidak menentukan pilihan.

Kekuasaan untuk dimaknai pula dalam dimensi social, khususnya dalam kaitannya dengan relasi social seperti yang dinyatakan oleh sosiolog Talcott Parsons, ia menyatakan sebagai kemampuan pada umumnya untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam hubungan social, terpisah dari alat yang digunakan atau status “pemberian wewenang” untuk membuat keputusan atau menentukan

kewajiban. Para pemegang kekuasaan memiliki otoritas untuk menentukan sejumlah kebijakan dan kewajiban kepada warga Negara, karena kekuasaan berkaitan dengan dominasi dan penyerahan diri.²³

Kekuasaan ialah ciptaan yang paling kuat dan berkuasa; seperti pada lingkungan alam mereka paling kuat, berani dan berkemauan teguh telah melaksanakan kemauannya pada pihak lemah, demikian pula di dalam Negara; menurut Voltaire, Raja yang pertama ialah pahlawan yang menang; bahwa setiap pergaulan hidup memerlukan organisasi pemaksa/ *coercive instrument*, demikian untuk menjamin kelanjutan hubungan produksi yang tetap, sebab kalau tidak demikian maka pergaulan hidup ini takkan dapat menjamin nafkahnya; menurut Duguit, yang dapat memaksakan kehendaknya kepada suatu pihak lain, ialah mereka orang-orang yang paling kuat (*less plus forts*), kekuatan itu dibentuk karena keistimewaan fisik, otak, ekonomi dan Agama; plato, bahwa keadilan itu adalah kepentingan sikuat yang menuntut penataan kepada kekuasaan yang ada berarti bahwa hukum dan kepentingan yang berkuasa adalag satu; Menurut Jelinek, Negara adalah kesatuan yang dilengkapi dengan "*Herrscenmacht*" yaitu kuasa memerintah bagi orang-orang yang ada didalamnya dan bahwa memerintah (*herrschen*) adalah mampu memaksakan kemauan sendiri terhadap orang lain, paksaan tanpa tawar-menawar; Krabbe, tidak betul Negara berkuasa memaksakan kehendaknya kepada pihak yang diperintah, karena Negara sendiri harus menaati

²³ Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Politik Profetik* (Makassar: Laboratorium Ilmu Politik Uin Alauddin, 2015) h.35-37

tata tertib hukum.²⁴ Teori digunakan karna dalam penelitian yang akan dilakukan melihat tentang hubungan pemilik kekuasaan dengan Lembaga adat dengan diterbitkannya perda LAD di Kabupaten Gowa dengan adanya perda LAD kemudian menimbulkan pro dan kontra di Kabupaten Gowa.

3. Teori Elit Politik

Istilah “elit” merupakan istilah yang tidak asing lagi, dimana istilah tersebut ini sering di posisikan pada makna yang mengarah pada status tertentu serta menguntungkan orang atau sekelompok orang yang diposisikan pada istilah tersebut. Kata yang sering mengiringi dan cukup populer dengan istilah “elit” adalah (elit agama) dan politik (elit politik).

Istilah “elit” bersal dari kata Latin “eligere” yang berarti memilih. Dalam pemakaian biasa, kata tersebut “bagian yang menjadi pilihan”. Dalam ilmu sosial, tekanan telah bergeser dari keadaan pilihan menjadi terkemuka. Arti yang paling umum ialah sekelompok orang-orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat. Amitai Etzioni mendefinisikan elit sebagai kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan termasuk politis. Konteks “bagian yang menjadi pilihan” mengindikasikan bahwa yang menjadi bagian aktor membedakannya dengan yang lain.

Terdapat dua tradisi akademik tentang elit. Dalam tradisi yang lebih tua, elit diperlukan sebagai sosok yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul. Elit dipandang sebagai

²⁴ Kabul Budiyo, *Teori Dan Filsafat Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2012) h.29

pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Dalam pendekatan yang lebih baru, elit di pandang sebagai suatu kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintahan. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin atau pembuat keputusan.²⁵

Bicara tentang elit politik sebenarnya lebih banyak mengacu pada probabilitas untuk memengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif, atau dalam bahasa yang lebih banyak kekuasaan politik dibanding dengan yang lain. Dalam hal ini elit politik berkaitan dengan seberapa besar kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Ada kalanya seorang yang mempunyai kekuasaan tetapi tidak memiliki akses pada pembuatan atau kebijakan tertentu yang dibuat pemerintah. Misalnya, seorang jenderal Amerika Serikat yang memiliki kekuasaan atas anak buahnya, tapi belum tentu secara langsung berpengaruh pada kebijakn pemerintah. Sebaliknya bisa juga seorang pemimpin buruh yang melancarkan aksi pemogokan dapat memengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah tentang upah buruh.²⁶

4. Teori Konflik

Konflik merupakan suatu hal yang tidak asing dalam kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu hal yang mustahil menghilangkan konflik dalam pergaulan hidup manusia terdiri dari konflik antar pribadi, atau konflik personal, dan konflik antar kelompok. Hubungan antara konflik personal dengan

²⁵Muh. Irfan Idris , *Sosiologi Politik* (Makassar: Aalauddin press 2010) h. 68-70

²⁶Ng. Philipus, *Sosiologi Dan Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 108

konflik kelompok sangat berkaitan. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab seringkali konflik kelompok dipicu oleh konflik awal yakni konflik personal atau antar pribadi.

Secara umum, konflik dapat diidentifikasi dengan melihat adanya pertentangan yang sangat potensial antara dua pihak. Potensial dimaksudkan sebagai kemampuan memiliki segenap daya dan upaya untuk memperoleh yang diinginkan . Konflik tidak akan meluas jika salah satu pihak memiliki potensi yang lebih kecil untuk memperoleh yang diinginkannya.²⁷

Konflik selalu ada merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama manusia masih hidup, tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini. Baik konflik intrapersonal, interpersonal, dan juga konflik antarnegara merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Berbagai macam seperti perbedaan selera, perbedaan pendapat dan kepentingan, dan berbagai perbedaan lainnya dapat menjadi penyebab untuk timbulnya konflik. Ilmuan yang menyelidiki tentang sejarah lahirnya Negara; antara lain Thomas Hobbes dalam teorinya tentang perjanjian masyarakat (kontrak sosial) berpendapat bahwa kehidupan manusia pada awalnya adalah kehidupan yang kacau-balau dan saling manaklukkan. Dikatakan olehnya, keadaan manusia sebelum adanya Negara, diumpamakan sebagai serigala bagi sesamanya. Solly Lubis menjelaskan pendapat Hobbes menyangkut keadaan manusia sebelum

²⁷ Muh. Irfan Idris, dan Nila Sastrawati , *Sosiologi Politik* , (Makassar: Alauddin Press) h.

terbentuknya Negara sebagai suatu suasana kehidupan yang tidak tenteram karena manusia dipimpin oleh egoismenya yang tidak dibatasi, merupakan *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya) dan terjadi peristiwa *bellum omnium contra omnes* (perang semua melawan semua).²⁸

Konflik diartikan sebagai pertentangan, percekocan, perselisihan, ketidaksamaan pendapat atau padangan. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Oleh Alo Liliweri konflik dirumuskan sebagai berikut:

1. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.
2. Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individual atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan.
3. Pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi, pelaku, atau yang terlibat didalamnya.
4. Sesuatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negative memengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat perasaan dan fisik orang lain terganggu.

²⁸ Samuel Waileruny, *Membongkar Konsfiras Dibalik Konflik Maluku*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) h. 25

5. Bentuk pertentangan yang bersifat fungsional, karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan membarui tampilan, namun fungsional karena menghilangkan tampilan kelompok.
6. Proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan dengan menyingkirkan atau melemahkan para pesaing.
7. Suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis
8. Kekacauan ransangan kontradiktif dalam arti individu.²⁹

Dari berbagai definisi tersebut terlihat bahwa dalam setiap konflik terdapat beberapa unsur:

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Jadi ada interaksi antarmereka yang terlibat
2. Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik . Tujuan itulah yang menjadi sumber konflik
3. Ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak untuk mendapatkan atau untuk mendapat tujuan dan sasaran
4. Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan. Ini Meliputi situasi antarpribadi, antarkelompok, dan antarorganisasi

Dari berbagai konflik yang terjadi, maka Liliweri menggolongkan konflik dalam beberapa tipe yakni konflik, dalam organisasi, konflik berdasarkan sifat, konflik berdasarkan faktor pendorong, konflik berdasarkan jenis ancaman, konflik

²⁹Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi Dibalik Konflik Maluku* , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) h. 27

berdasarkan apa, kapan, tempat, konflik berdasarkan memandang peristiwa atau isu dan konflik berdasarkan level Pemerintah. Pada setiap konflik, secara umum dapat dibedakan dalam : (1) Konflik data, disebabkan antara lain: emosi yang kuat, salah persepsi, miskin, perbedaan pandangan terhadap data, perbedaan terhadap prosedur. (2) Konflik relasi, disebabkan antara lain: emosi yang kuat, salah persepsi, salah komunikasi. (3) Konflik nilai, disebabkan antara lain karena perbedaan kriteria untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku orang lain, nilai baru untuk mencapai tujuan yang dikemukakan terlalu eksklusif, gaya hidup yang berbeda, perbedaan politik, ideology, agama. (4) Konflik kepentingan, disebabkan antara lain: isi, prosedur, kepentingan, prosedur.³⁰

F. Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau

³⁰Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi Dibalik Konflik Maluku*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) h. 28-29

sekolompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³¹ proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur pengumpulan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara deskriptif. Tujuan dalam penelitian diskriptif adalah membuat deskripsi atau menggambarkan fakta-fakta.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di berbagai tempat di Kabupaten Gowa seperti Kantor DPRD, Kantor Bupati, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Beberapa tempat yang berada dalam wilayah di Kabupten Gowa.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni :

1. Metode Library research

Metode Library Research yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku, jurnal, skripsi, dan internet atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik yang di gunakan adalah sebagai berikut:

- (a) Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.

³¹ Jhon W Creswell, *Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2012)h .4

- (b) Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya.

2. Field Research

Field Research yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah di tentukan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini melalui dua cara yakni observasi dan wawancara :

- (a) Observasi adalah proses yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipasi utuh.³² Dengan melakukan obsevasi sebelum peneliti agar peneliti dapat mengetahui jelas kondisi dilapangan dan mangamati tentang realitas yang terjadi dan melihat tentang pro dan kontra dengan diterbitkannya Perda LAD di Kabupten Gowa.
- (b) Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang juga banyak digunakan, terutama dalam penelitian masalah sosial. Dalam hal ini, informasi

³² John W. Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka belajar, 2009) h.267

atau keterangan diperoleh langsung dari *informan* dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Menggunakan istilah *informan* dalam wawancara sebagai sinonim *responden* dalam pelaksanaan tes dan pemberian angket. Hal ini dilakukan karena wawancara merupakan proses percakapan yang berbentuk Tanya jawab dengan tatap muka, namun berbeda dengan percakapan sehari-hari. Walaupun demikian, wawancara bisa juga dilakukan melalui telepon, telewicara, melalui televise, atau alat komunikasi lain seperti cerita tertulis yang diminta kepada *informan*.³³ Wawancara akan dilakukan dengan pedoman atau pertanyaan yang telah tersusun mengenai masalah yang akan diteliti terkait Respon Pemerintah dan Pemangku Adat Di Kabupaten Gowa Terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah.

Beberapa *informan* yang diwawancara :

1. Pemangku Adat Bate Salapang : Sirajuddin Ardan, Hasan dg puang, hj Djaga, A. Makmun Bau Tayang Karaeng Bonto Langkasa.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: Drs. Rimba Alam A. Pangerangi. M.Si
Kepala Kabag Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Sekda Kabupaten Gowa
3. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Kabupaten Gowa: Muh. Taslim
S.H., M.H Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekda Kabupaten Gowa

³³ Muhammad Arif Tiro, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Survei* (Makassar, Cv Andira Karya Mandiri, 2011) h.143

4. Anggota DPRD kabupaten Gowa , A. M Yusuf Harun, ST,. Msi selaku

ketua komisi I DPRD Kabupaten Gowa, Sekretaris Pansus LAD

5. Masyarakat Gowa .

3. Teknik analisis data

Pengolahan dan analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif dimana jenis data yang terbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih di mengerti. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang di lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Pengumpulan informasi ini sebagai laporan atau hasil dengan cara menulis keterangan terkait masalah yang akan diteliti tentang Respon Pemerintah dan Pemangku adat terhadap Perda LAD nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah di Kabupaten Gowa .
- b) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Peneliti akan melakukan penyederhanaan tentang fakta-fakta yang terdapat dilapangan menyaring fakta-fakt yang ditemukan dilapangan terkait dengan yang diteliti.

- c) Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif.
- d) Menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan. Peneliti menarik sebuah kesimpulan yang dianggap penting dengan pola-pola atau prosedur yang digunakan peneliti .



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

1. Letak dan Geografis

Kabupaten Gowa adalah kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi selatan yang merupakan daerah otonomi sendiri. Di sebelah Utara berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 desa/ Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 Km² atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72, 26 persen dan sisanya 27,74 persen berada di dataran rendah. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu' dan Biringbulu'. Dari luas total Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu. Kabupaten ini memiliki enam gunung dan yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng.³⁴

³⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015

Table I.I Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kab. (Km)	Luas Kecamatan (Km²)	% Thd Luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallasssang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62

JUMLAH	1.883,33	100
---------------	----------	-----

36

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu seluas 881 kilometer persegi dengan panjang 90 kilometer dan daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan Kabupaten Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya yang subur. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas yaitu Kecamatan Tombolo Pao yang berada di dataran tinggi, dengan luas 251,82 Km² (13,37 persen dari luas wilayah Kabupaten Gowa). Sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil yaitu Kecamatan Bajeng Barat, yang luasnya hanya 19,04 Km² (1,01 persen). Berdasarkan bentuk topografi yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang. Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili di atas aliran sungai Jeneberang dengan luas \pm 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas \pm 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.³⁷

³⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015

2. Iklim dan Cuaca

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 2.467 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

3. Jumlah penduduk

Kabupaten Gowa termasuk kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2014, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 709.386 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45 persen penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58 persen wilayah Gowa hanya dihuni oleh

sekitar 45,55 persen penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12 persen, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 63,18 persen dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Berdasarkan jenis kelamin dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa adalah terdapat 348.706 laki-laki dan 360.680 perempuan.³⁸

Tabel. I. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki	Perempuan	Jumlah	
Bontonompo	19.650	21.480	41.138	91
Bontonompo Sel	14.141	15.312	29.453	92
Bajeng	33.037	33.838	66.875	98
Bajeng Barat	11.832	12.464	24.296	95
Pallangga	55.997	57.420	113.417	98
Barombong	18.726	19.207	37.933	97
Somba Opu	75.577	76.339	151.916	99
Bontomarannu	16.796	17.052	33.858	98
Pattalassang	11.699	11.715	23.414	100
Parangloe	8.709	9.125	17.834	95
Manuju	7.129	7.599	14.728	94
Tinggimoncong	11.572	11.794	23.366	98
Tombolo Pao	14.465	14.039	28.504	103
Parigi	6.071	6.811	12.882	89
Bungaya	7.815	8.636	16.778	94
Bontolempangan	6.016	6.682	12.689	90
Tompobulu	13.916	14.937	28.853	93
Biringbulu	15.558	16.445	32.003	95

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015

Jumlah	2014	348.706	360.680	709.386	97
Total	2013	339.575	351.734	691.309	97
	2012	329.673	340.792	670.485	97
	2011	324.021	335.492	659.513	97
	2010	320.793	332.148	352.941	97

Sumber: BPS Kab. Gowa, Gowa dalam Angka 2015

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil angka sementara Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2015, tercatat bahwa dari penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dari Kabupaten Gowa sekitar 16,86 persen tidak pernah sekolah, 18,82 persen yang masih sekolah dan 64,32 persen sudah tidak bersekolah lagi. Sudah menjadi kesadaran kita bersama bahwa pendidikan saat ini memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Sehingga pembangunan dibidang pendidikan ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.

Tabel. I.3 Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/MI/Sederajat	58.184	70.070	128.254
2	SMP/MTS/Sederajat	42.234	37.825	80.059
3	SMA/SMK/MA/Sederajat	47.856	47.688	95.544
4	D3	1.483	3.118	4.601
5	S1/S2/S3	11.432	11.304	22.736

Sumber: BPS Kab. Gowa, Gowa dalam Angka 2015

Tabel. I.4 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang ditamatkan

Status Pendidikan	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Total <i>Total</i>
Tidak Pernah Sekolah	24.232	37.667	61.898
SD/MI	23.266	20.304	43.570
SLTP/MTS/Sederajat	15.455	16.576	32.031
SLTA/MA/Sederajat	16.946	15.440	32.031
Diploma I Ke Atas	9.384	10.546	19.929
Tidak bersekolah Lagi	186.733	190.751	377.484
Jumlah/ <i>Total</i> 2014	276.014	291.283	567.289
2013	265.205	281.461	546.666
2012	253.198	236.252	471.450
2011	241.466	251.797	493.263
2010	254.799	268.177	522.976

Sumber: BPS Kab. Gowa, Gowa dalam Angka 2014³⁹

5. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Pembangunan Daerah yaitu “Terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggara pemerintahan”.

Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Gowa, dirumuskan misi Kabupaten Gowa, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat.
2. Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi.

³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015

3. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat.
4. Meningkatkan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap pengelolaan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pada tahun 2012 telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 dikatakan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gowa adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju dibidang pertanian, industri, jasa, perdagangan dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata.

B. Sejarah Kerajaan Gowa

Sebelum Kerajaan Gowa berdiri pada tahun sekitar abad XIV, daerah ini sudah di kenal dengan nama Makassar dan masyarakatnya di sebut dengan suku Makassar .⁴⁰ Nagarakartagama yang di tulis oleh Parpanca pada zaman Gajah Mada

⁴⁰ Syamsuez Salihima, *Peta politik di Sulawesi Selatan pada awal Islamisasi* (Makassar: Alauddin University Press , 2014)hal. 99

(1364) menyebut nama Makassar dan sumber ini dianggap tertua yang memuat nama Makassar dalam sarga XIII dan berikut:

Muwah tanah: Bantayan Pramuka Bantayan len luwuk tentang Udamakartayadhi nikanang sanuasaspupul Ikangsakasanu-sanusa Makasar Banggawi Kuni Craliyao Mwangi (ng) selaya soto Muar .

Kata “Makassar” yang dimaksud Parapanca dalam tulisan tersebut bukanlah sebuah nama suku, melainkan nama sebuah negeri yakni negeri Makassar, sebagaimana halnya negeri Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwu), Butun (Buton), Selaya (Selayar) dan lainnya. Pada Atlas Sejarah, halaman lain, yang melukiskam tenggelamnya sriwijaya, Singosari (1222-1293), hanya disebut Bantayan di jazirah selatan, sebagai daerah Singosari dibawah Kertanegara (1254-1292).⁴¹

Sumber lokal ditemukan informasi tentang Makassar seperti yang terdapat dalam sumber himne bissu di Bone sebagaimana yang telah tertulis dalam Gilbert Hamonic sebagai berikut:

399. Nasama nrelle taunna

400. Nasma turu puanna Rau-rau rimangkasa

401. Bua tello ri Malaju

403. Pammolo liweng ri Sunra .

Nama “Mangkasa” yang tercantum dalam himne di atas adalah nama lain dari Makassar yang di sebutkan bersamaan dengan Melayu dan Jawa. Nama ketika

⁴¹ Syamsuez Salihima, *Peta politik di Sulawesi Selatan pada awal Islamisasi* (Makassar: Alauddin University Press , 2014)hal. 99-100

tempat tersebut diperkirakan telah ada pada abad IX M. Dalam buku sejarah menyebutkan Makassar sama dengan Kerajaan Gowa, seperti dalam tulisan F.W Stafel sebagai berikut:

Tot de alberbelangrijkste platsen van de Archipel in het bagin van de 17de eew behoorder Makassar, hoofdplants van het rijk van die naam, ook wel goa genoemnd.

Diantara tempat-tempat yang paling penting dari kepulauan itu permulaan abad XVII Adalah Makassar, ibu kota sebuah kerajaan dengan nama yang sama yang juga dinamakan Gowa .⁴²Pada zaman Kerajaan Gowa pra Islam muncul empat orang raja yang memegang pemerntahan yaitu:

- a. Bantara Guru
- b. Saudara Batara Guru yang dibunuh di Talali (nama asli tidak diketahui)
- c. Ratu Sapu (Marancai)
- d. Karaeng Katangka (nama asli yang diketahui)

Menjelang terbentuknya Kerajaan Gowa, daerah ini terdiri atas sembilan kerajaan kecil yang disebut Kuaswiyang Salapang (Sembilan negeri yang memerintah), yaitu: 1. Tombolo, 2. Lakiung, 3. Suamata, 5. Parang-parang, 6. DataAgang, 7. Je'ne, 8. Bisei, 9. Kalling.

1. Sero (Abd Razak Daeng Patunru, 1969:1)

⁴²Syamsuez Salihima, *Peta politik di Sulawesi Selatan pada awal Islamisasi*(Makassar: Alauddin University Press , 2014)hal. 100-101

Kerajaan-kerajaan kecil ini sering mengalami perselisihan yang terkadang menjadi perang terbuka. Maka raja-raja tersebut membentuk suatu gabungan yang dikepalai seorang pejabat yang disebutnya Paccalaya. Ia berfungsi sebagai ketua dewan kesembilan kerajaan kecil yang menjadi anggotanya. Selain itu, ia juga merupakan penengah dalam mendamaikan perselisihan diantara kerajaan-kerajaan itu. Namun, kerajaan-kerajaan kecil tersebut tetap pertahankan kedaulatan dan otonomi pemerintah daerahnya.

Paccallayya sebagai ketua dewan tidak memiliki kewenangan memaksa dalam permasalahan yang timbul. Sehingga kerajaan-kerajaan kecil ini tidak stabil dan tidak merasa tenang. Karena sering timbulnya perselisihan diantara mereka, maka dirasakan untuk perlu mencari tokoh sentral diluar kalangan mereka yang dapat memerintah Gowa. Hingga ditemukannya *Tomanurung di takkabbsai Tamalate* yang kemudian menjadi *somba ri* Gowa (Raja Gowa yang pertama).

Mereka sangat gembira karena telah menemukan seorang putri di Taka'bassi. Perempuan inilah yang disebut *Tomanurung* sebab dipandang dari atas dan turun. To (tau) berarti manusia, sedangkan *Manurung* berarti turun. Penamaan Tomanurung tersebut, karena dianggap berasal dari tempat yang tinggi, Namun Dia tetap manusia. Mungkin yang mereka maksudkan bahwa orang ini mempunyai sifat dan perbuatan yang mulia melebihi apa yang mereka punya atau yang dipunyai kebanyakan orang. Sehingga perempuan yang sepatutnya diberi kedudukan yang tinggi dan *Tomannurung* inilah yang dirajakan Gowa. Rakyatpun membangun istana kerajaan di tempat yang bernama Taka'bassi yang diberi nama Tamalate. Raja yang

kesembilan tadi terhimpun ke dalam satu tangan Tomanurung dan masing-masing mereka hanya memegang panji yang disebut “bate”, lalu mereka bergelar *Bate Salapang* atau Sembilan pemegang panji.

Rakyat ternyata mempunyai pendanga yang jauh ke depan. Mereka menginginkan adanya penerus di masa-masa selanjutnya. Oleh karena itu, mereka mendambakan adanya seorang laki-laki yang tidak kurang sifat-sifat kemuliannya untuk menjadi pasangan hidup Tomanurung. Akhirnya mereka menemukan seorang laki-laki di Bantaeng yang diketahui muncul dengan tiba-tiba di tengah-tengah masyarakat yang hidup di air (orang-orang bayo). Disebutlah Karaeng Bayo. Dikaitkan betis orang ini dipenuhi dengan tiram, diduga karena pengalamannya di laut dengan keunggulan armada Gowa di Samudra Nusantara. Orang inilah yang diminta untuk mempersunting Tomanurung. Setelah perkawinan, merekalah yang memimpin kerajaan Gowa.

Adapun kewajiban dan hak yang menjadi kewenangan Karaeng Bayo dalam pemerintahan Gowa yang disepekati dalam perjanjian antara *paccallaya* bersama *Kasuwiang Salapang* disatu pihak dan *Tomanurung* bersama Karaeng Bayo di lain pihak. Antara lain dinyatakan: Tuanlah yang menjadi sangkutan dan *kamilah lau* (tempat air) yang menyangkut. Jika patah sangkutan maka pecah pulalah *lau*. Tapi jika patah sangkutan dan lau tak pecah, maka kami yang mati.

Pasal demi pasal dikemukakan dengan jelas , dengan kalimat yang lancar dan mudah dipahami, meskipun setiap kata mengandung pengertian yang mendalam.

Menurut Andi Ijo Karaeng Laloang (raja Gowa yang terakhir) dijelaskan bahwa kata “Gowa” berasal dari “Goa” yang berarti “liang”, yaitu suatu tempat dimana Tomanurung ditemukan. Masa pemerintahan Tomanurung dan beberapa raja sesudahnya tidak banyak dijelaskan oleh sejarah. Nanti pada masa pemerintahan raja Gowa VI Tonangka Lopi, beliau mengadakan suatu hal yang baru yaitu membagi wilayah kerajaan Gowa menjadi dua bagian untuk dua orang putranya, karena kekawatirannya akan terjadi perang saudara. Pembagian tersebut meliputi daerah-daerah yang diperintahkan oleh raja Gowa VII (Batara Gowa), yaitu: Paccelenggang, Bontomanai Ilau, Bontomanai Iraya, Tombolo, Mangasa.

Kerajaan Tallo yang diperintahkan oleh Karaeng Loe ri Sero (Raja Tallo I) meliputi daerah-daerah sebagai berikut: Gallarang Saumata, Gallarang Pannampu, Gallarang Moncong Loe, Gallarang Parang Loe. Pembagian ini merupakan awal munculnya kerajaan Tallo dengan kerajaan yang beretonomi didalam kerajaan Gowa. Namun pembagian ini menimbulkan ketidakpuasan diantara kedua bersaudara, sehingga menimbulkan perang saudara antara kerajaan Gowa dan Tallo dan kemenangan terus berada di pihak kerajaan Gowa. Pada masa pemerintahan kerajaan itu disatukan dengan suatu kata mufakat yaitu: “Rua Karaeng Nase're Ata”. Maksudnya dua raja tetapi satu rakyat.

Bersatunya raja Gowa dan Tallo sebagai kerajaan kembar orang Makassar, maka wilayah kerajaan Gowa sudah meliputi tanah Makassar. Diciptakanlah suatu peraturan bahwa siapa saja yang menjadi raja Tallo maka dia pula yang menjabat

Mangkabumi (Pabbicara Butta) kerajaan Gowa. Dilakukanlah penguasaan wilayah dengan mengadakan penaklukan-penaklukan ke daerah-daerah sekitarnya.

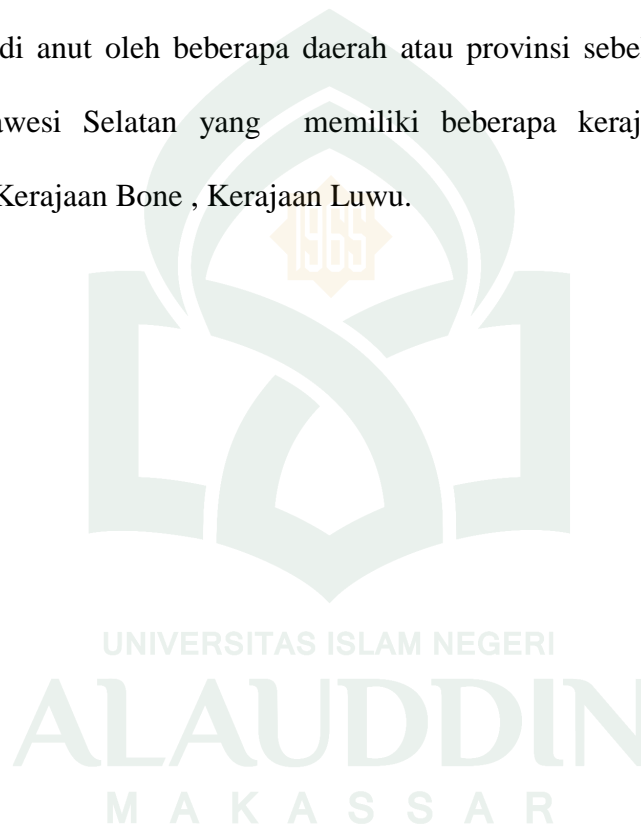
Setelah raja Tomapa'risi Kallona wafat, beliau digantikan oleh putra yang bernama I Mario Gau Daeng Bonto Karaeng Lakiung sebagai raja Gowa X dengan gelar Karaeng Tonipallangga Ulaweng. Pada periode raja X beliau bersama mangkubuminya raja Tallo berhasil menaklukan banyak negeri-negeri di Sulawesi Selatan, antaranya Bajeng, Langkese, Lamuru, Cenrana, Salo Makko, Bulu-bulu, Pamatti, Bulukumba, Panjikokang, Gantarang, Bira, Selayar, Otteng, Wajo, Sawitto, Soppeng, Alitta, beberapa negeri dalam Mandar, Kaili dan Toli-toli di Sulawesi Tengah.

Pemerintahan Tonipallangga ini mengantar kerajaan Gowa menjadi terkenal dan muncul sebagai kerajaan besar berkuasa di Indonesia bagian Timur. Pelabuhan Makassar ramai dikunjungi oleh pedagang-pedangan dari Melayu. Begitu pula sebaliknya orang-orang Gowa mengunjungi Malaka. Pedagang-pedang Melayu diberi tempat tinggal di kampung Manga Ilekana di sekitar benteng Somba Opu dibawah pimpinan nahkoda Bonang. Hal ini erat hubungan dengan kedatangan Islam di kerajaan Gowa lewat jalur perdagangan.

Terdapat beberapa orang raja memerintahkan sesudah periode raja Gowa X ini tidak membawa kerajaan kepada kemajuan secara signifikan, hanya memelihara yang ada. Setelah 1 Mangerangi Daeng Manrabia menduduki tahta kerajaan dengan

gelar Sultan Alauddin pada pemerintahan raja Gowa XIV, terjadi suatu perubahan baru di bidang politik, ekonomi dan keagamaan.⁴³

Kerajaan kini telah mejadi sejarah masa lampau setelah runtuhnya beberapa kerajaan yang ada dan telah menjadi warisan dalam sebuah negara . Indonesia telah menjadi negara kesatuan dan menganut sistem demokrasi bukan lagi sisstem kerajaaan yang di anut oleh beberapa daerah atau provinsi sebelum kedaulatan di akui,seperti Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa kerajaan diantaranya Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone , Kerajaan Luwu.



⁴³ Syamsuez Salihima, *Peta politik di Sulawesi Selatan pada awal Islamisasi* (Makassar: Alauddin University Press , 2014)hal. 111-116

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Respon Pemerintah dan Pemangku Adat Terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah Di Kabupaten Gowa

1. Respon Pemerintah Terhadap Perda LAD

Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa, selanjutnya di singkat LAD Kabupaten Gowa adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarannya atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat dan budaya di Kabupaten Gowa. Pembinaan dan pengembangan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pestaarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.⁴⁴

Atas Dasar pelestarian dan pengembangan kemudian DPRD Kabupten Gowa melahirkan sebuah perda tentang LAD dan Kemudian disahkan dan di nomor registrasikan, Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat Dan Budaya Daerah.

⁴⁴ Lampiran *Perda* Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat dan Budaya di Kabupten Gowa

Seperti yang telah di kemukakan oleh Bapak Muh. Taslim, S.H , M.H selaku Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekda Kabupaten Gowa :

*Lahirnya LAD ini di ciptakan sebagai wujud kepedulian terhadap kerajaan dan tujuan untuk melestarikan, tidak ada maksud lain dan tentu adat harus di pertahankan*⁴⁵

Tujuan terbitnya Perda LAD ini sangat baik sebagai pelestari untuk mengembangkan nilai-nilai Adat dan Budaya yang berada di Kabupten Gowa namun dalam hal lain yang menjadi dasar dari sebuah pro dan kontra atas perda LAD beberapa keluarga Kerajaan serta masyarakat menolak berbeda halnya yang berada pada tatanan Pemerintahan Kabupaten Gowa . Nilai-nilai Adat dan budaya memang seharusnya harus dijaga dilestarikan .

Seperti yang kemukakan oleh Bapak Drs. Rimba Alam A. Pangerangi. M.Si Kabag Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Gowa :

LAD sebagai pelestari jadi tentu tujuannya baik dan penolakan yang kita lihat ini dari keluarga kerajaan karna merasa bahwa mereka akan tersingkirkan dengan adanya LAD mau tidak mau karna ini semua sudah sah dan sudah menjadi Perda .

Lahirnya perda LAD Kabupaten Gowa ini kemudian menimbulkan berbagai pro dan kontra antara keluarga kerjaan dan Pemda Kabupaten . Meski LAD ini sebagai wujud Pelestari, namun tidak diterima oleh beberapa Pemangku Adat di Kabupaten Gowa.

⁴⁵ Muh. Taslim S.H., M.H Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekda Kabupaten Gowa wawancara tanggal 04 November 2016

Lahirnya perda LAD merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh Pemerintah Gowa dan disahkan oleh DPRD Gowa , Perda ini dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Gowa untuk melestarikan segala nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Gowa , namun kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membentuk persepsi dimasyarakat perda ini lahir untuk memutus keturunan dari kerajaan Gowa , karna masyarakat menganggap bahwa setiap Bupati yang dilantik berhak menjadi Raja .

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Taslim S.H., M.H

Perda LAD ini merupakan usulan dari Pemerintah daerah Kabupaten Gowa kami yang mengonsultasikan agar Perda ini bisa disahkan oleh DPRD jadi ini Perda LAD usulan dari sini dan DPRD ini yang dilakukan untuk melakukan Studi banding ke beberapa kerajaan dan merevisi dan usulan atas perda ini disahkan hingga menjadi perda karna inimi fungsinya DPRD perda ini disahkan meskipun banyak terjadi pro dan kontra .⁴⁶

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa ini memiliki pengaruh penuh atas perda LAD berdasarkan pernyataan di atas. Kekuasaan pemerintah Kabupaten Gowa ini terlihat bagaimana memproduksi perda yang menurut saya sebagai peneliti sangatlah kontroversial ini ditandai dengan banyaknya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Gowa ataupun dari pihak keturunan Kerajaan Gowa .

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Rimba Alam A. Pangerangi. M.Si

⁴⁶ Muh. Taslim S.H., M.H Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekda Kabupten Gowa wawancara tanggal 04 November 2016

Saya ikuti saja maunya bosska (Bupati) maumi diapa kalau bosska menginginkan ini perda ,sebetulnya dilematis di sisi lain saya masih keturunan kerajaan dan sisi lain saya bawahannanya boss ka jadi ikuti saja .Ada sih rasa tidak enak terhadap keluarga kerajaan tpi saya tidak bisa apa-apa menolak atau menerima ini perda jadi biarkan saja .⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Pemerintah daerah memiliki sebuah pengaruh yang besar, pemegang kekuasaan memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memengaruhi untuk memperoleh apa yang diinginkan . seperti halnya memberikan usulan Perda kepada DPRD, Usulan ini kemudian akan dibahas dan rencanakan sesuai dengan keinginan oleh Pemilik Kekuasaan seperti apa yang telah terjadi di Kabupaten Gowa Lahirnya Perda LAD atas dasar keinginan dari Pemerintah Kabupten Gowa, Selanjutnya melahirkan sebuah permasalahan di Kabupaten Gowa .

Seperti apa yang di ungkapkan oleh Bapak Muh. Taslim S.H., M.H

Perda LAD ini meskipun banyak menuai pro dan kontra bahkan menimbulkan konflik, Perda LAD akan tetap diterapkan mau tidak mau LAD inikan sudah sah dan Perda ini telah melalui prosedur, pada saat Ranperda juga kami menyurat atau melakukan pemanggilan terhadap keluarga Kerajaan , pemangku adat/Bate Salampang , sejarawan dan budayawan.⁴⁸

Perda LAD ini telah melalui semua prosedur meskipun terdapat penolakan oleh masyarakat dan Keluarga kerajaan maka tetap akan dijalankan dalam isi Perda LAD pada BAB VII pasal 11 poin I : Pembinaan dan pengawasan tas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Gowa dilakukan oleh Pemerintah

⁴⁷ Drs. Rimba Alam A. Pangerangi. M.Si Kepala Kabag Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Sekda Kabupaten Gowa, Wawancara Pada Tanggal 04 November 2016

⁴⁸ Muh. Taslim S.H., M.H Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekda Kabupten Gowa wawancara tanggal 04 November 2016

Daerah. Jadi seluruh aset dan urusan kerjaan kini yang menjadi penanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten Gowa .

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Taslim S.H., M.h Kabag Hukum Perundang-undangan Sekda Kabupaten Gowa :

Posisi Keluarga kerajaan tidak memiliki wewenang atas Balla Lompoa setelah lahirnya LAD , jadi tidak ada haknya untuk menguasai seluruh aset kerajaan karna semua telah di atur dalam Perda LAD ini , kalau menolak masalah isi dari kata Perda tentang LAD biar lah karna ini Perda sudah sah jadi tidak boleh di ganggu gugat meski ada demo, itulah yang diprotes dari kubunya sebelah(Andi Madusila) .⁴⁹

Pengesahan perda LAD mengakibatkan timbul beberapa implikasi terhadap kehidupan sosial di kabupaten gowa, isi perda LAD dengan substansi bahwa raja diangkat menjadi *somba* yang bermakna *king* (Raja) secara tidak langsung di satu sisi memberi legitimasi kepada pemda (Bupati) Gowa mengambil alih kepengurusan cagar budaya namun disisi lain membuat keturunan raja gowa kehilangan hak atas cagar budaya yang dianggap miliknya secara turun temurun.

Pengambil alihan hak pemeliharaan cagar budaya inilah berimplikasi terhadap timbulnya konflik di kabupaten Gowa antara Pemda (bupati) Gowa dengan keturunan raja Gowa yakni Kubu Andi Maddusila Usman yang mengakibatkan beberapa benda pusaka rusak bahkan hilang. Rusak dan hilangnya beberapa benda-benda pusaka mengindikasikan bahwa substansi dari dikeluarkannya LAD sudah

⁴⁹ Muh. Taslim S.H., M.H Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekda Kabupaten Gowa wawancara tanggal 04 November 2016

keluar dari cita-cita awalnya yaitu pemeliharaan dan malah yang terjadi adalah penrusakan.

Sepanjang perjalanan dari sebuah proses Ranperda hingga LAD ini resmi dan disahkan menjadi Perda tentu banyak rintangan yang harus dilewati dalam proses yang begitu panjang mulai dengan aksi protes adanya kata Raja dalam naskah akademik Ranperda hingga DPRD harus mengubah menjadi *Sombayya*. Meskipun kata Raja dihilangkan dan diubah menjadi *Sombayya* masyarakat dengan tegas menolak namun DPRD tetap harus mensahkan menjadi Perda LAD .

Seperti apa yang di kemukakan oleh A. M Yusuf Harun, ST., Msi selaku ketua komisi I DPRD Kabupaten Gowa, Sekretaris Pansus LAD :

Perda LAD muncul atas dasar adanya permasalahan di dalam internal kerajaan Gowa dengan adanya permasalahan maka kemudian Pemerintah Kabupten Gowa ini mengusulkan LAD ini agar lebih memperhatikan Adat dan budaya yang ada di Kabupten Gowa, seharusnya masyarakat harus lebih mengerti Perda LAD ini bertujuan sebagai Pelestari saja . kata Raja atau sombayya itu cumin sekedar simbol dalam isi Perda LAD itu menyatakan bahwa Ketua LAD menjalankan fungsi dan peran sebagai sombayya , jadi bukan menjadi sombayya , karna somba atau raja yang terakhir di Kabupten Gowa yaitu Bupati pertama . Jadi aksi Protes yang dilakukan oleh masyarakat karna kurang memahami Perda LAD.⁵⁰

2 . Dilematis Aparatur Birokrasi dalam merespon perda LAD

Terkait perda LAD yang telah disahkan dan dijalankan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini telah terdapat berbagai respon mengenai dengan masalah yang terjadi di kabupaten Gowa . Respon yang diberikan pun berbagai macam baik itu pro

⁵⁰ A. M Yusuf Harun, ST., Msi selaku ketua komisi I DPRD Kabupaten Gowa, Sekretaris Pansus LAD, Wawancara, Pada Tanggal 30 November 2016.

maupun kontra, dalam perda LAD tentu tujuan pemerintah dengan menerbitkan perda lad ini sebagai wujud pelestari dalam tatanan adat dan budaya kerajaan Gowa, karna melihat adanya permasalahan yang terjadi pada tatanan kerajaan kemudian membuat sebuah perda LAD. Munculnya perda LAD ini mendapat sebuah respon dan hangat diperbincangkan sejak diterbitkannya perda LAD, melihat pada tatanan birokrasi aparatur pemerintah Kabupaten gowa dalam merespon perda LAD .

Terbitnya perda LAD kemudian peneliti mendapat beberapa yang kontra terhadap perda LAD, salah satu respon dalam tatanan aparatur birokrasi pemerintahan kabupaten gowa yang menyatakan :

*bahwa perda LAD ini memang tidak layak untuk diterapkan di kabupaten gowa karna melihat adanya keganjilan dan di sisi lain di kabupaten Gowa ini telah ada lembaga adat/pemangku adat yang mengurus masalah adat dan kebudayaan atau mengenai dengan urusan kerajaan, perda LAD ini memiliki maksud dan tujuan tertentu.*⁵¹

bahkan adapula dalam Aparatur Birokrasi pemerintah Kabupaten Gowa yang menyatakan :

*bahwa perda LAD ini diterbitkan secara paksa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa karena perda ini usulan dari pemerintah Kabupaten gowa dan terdapat desakan untuk mensahkan dan menjalankan perda LAD.*⁵²

Dilematis yang terdapat pada tatanan aparatur birokrasi yang tak mampu berbuat banyak dikarenakan mereka harus tunduk dan patuh terhadap pemerintahan. Dalam hal menyangkut masalah perda LAD ini mereka bungkam tak banyak merespon, karena mereka berada pada tatanan pemerintahan meski disisi lain tidak

⁵¹ Aparatur Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa, wawancara, Pada Tanggal 04 November 2016

⁵² Aparatur Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa, wawancara, Pada Tanggal 04 November 2016

setuju/kontra dengan terbitnya perda LAD. Melihat tatanan aparatur birokrasi tatanan pemerintahan Kabupaten Gowa sebahagian dalam perangkat aparatur birokrasinya kontra terhadap perda LAD, jabatan yang dimiliki oleh beberapa yang kontra terhadap LAD rata-rata sebagai kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) karena sebuah jabatan yang berada pada tatanan pemerintahan, sehingga tak dapat berbuat sesuatu atau penolakan secara terang tentang perda LAD tersebut , seperti yang telah kemukakan oleh seorang aparatur birokrasi pemerintahan gowa menyatakan :

bahwa yang seharusnya dilakukan yaitu mengikuti sang pemilik kekuasaan (Bupati), perda LAD ini sebuah keinginannya maka secara tegas harus mengikuti dan setuju terhadap perda tersebut .

Terkait persoalan perda LAD yang memiliki kontroversi atau pro dan kontra dalam hal ini perda LAD telah mencederai tatanan pada adat dan budaya, karena dalam perda LAD BAB I pasal I poin ke 3 yang menyatakan ketua Lembaga Adat yang disebutkan Ketua LAD Bupati Gowa yang menjalankan fungsi dan peran *sombayya*.⁵³ seperti yang dikatakan oleh salah satu aparatur birokrasi tatanan pemerintahan Kabupaten Gowa :

*secara tegas hal ini kemudian yang menimbulkan pro dan kontra perda disebutkan Bupati sebagai ketua dan menjalankan fungsi dan peran sombayya, dikarenakan menggantikan atau mengukudeta raja yang sekarang (A. Maddusila). Kemudian posisi keluarga Kerajaan atau keturunan kerajaan kini tidak diakui lagi dalam perda LAD karna sudah jelas dalam perda LAD ada sruktur kerajaan yang baru kemudian posisi pemangku adat serta aset kerajaan di ambil alih pemerintah berdasarkan dalam perda LAD.*⁵⁴

⁵³ Lampiran Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah

⁵⁴ Aparatur Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa, wawancara, Pada Tanggal 04 November 2016

Dilematisnya Birokrasi di Kabupaten Gowa yang cenderung bungkam terhadap persoalan LAD ini dikarenakan mereka ketakutan mereka akan mutasi jabatan dan berdampak pada karir mereka apabila mereka ikut campur terhadap persoalan LAD ini. Seperti hasil penemuan saya dilapangan sewaktu melakukan penelitian, memang jawaban-jawaban dari responden dari pihak Birokrasi cenderung menganggap *positife* terhadap LAD , tetapi ada kekecewaan yang terselip dari jawaban mereka seperti dampak kekisruhan dimasyarakat yang terjadi apabila perda LAD ini diterapkan dan kekecewaan dari pihak keturunan kerajaan atau para pemangku adat. Hal yang menjadi kontroversi yaitu adanya kata *Sombayya* atau kedudukan Bupati sebagai ketua LAD, dengan adanya kata *sombayya* maka kemudian gelar kebangsawanan yang diwariskan terhadap beberapa keturunan kerajaan kini secara perlahan akan hilang/terkikis dengan adanya LAD dikarenakan dalam perda LAD ini hak berada pada tatanan pemerintahan atas perda LADnya.

3 . Respon Pemangku Adat terhadap Perda LAD

Sebagian ilmuwan politik menyebut bahwa kekuasaan seringkali diperoleh seseorang dengan cara-cara tertentu termasuk kekerasan. Mulai dari keruntuhan tradisi dan berkembangnya tatanan modernitas yang menyediakan begitu banyak alat dan instrument untuk memperoleh kekuasaan. Meski perubahan sudah terjadi diseluruh aspek kehidupan, namunutama kekuasaan menurut Machiavelli adalah kekerasan. Menurutnya penguasa politik yang enggan menggunakan kekerasan tidak

akan pernah memperoleh kekuasaan atau akan kehilangan kekuasaan yang pernah diraihinya Tentu saja penggunaan kekerasan disini tidak dalam arti yang berlebihan, tetapi kekerasan yang meningkatkan legitimasi dan kepatuhan rakyatnya namun berbeda halnya yang terjadi di Kabupaten dengan cara kekerasan kemudian memunculkan ketidak patuhan terhadap aturan serta memunculkan pertentangan oleh masyarakat serta keluarga Kerajaan Gowa.

Seperti apa yang di ungkapkan oleh Bapak Sirajuddin Ardan, S.H (Dg Sore)

Wakil ketua Lembaga Adat Bate Salapang.

Perda LAD ini tidak layak untuk diterapkan sebagaimana keinginan dari pemerintahan Kabupaten Gowa , kenapa meski mengeluarkan perda LAD tanpa LAD ini kan sudah ada lembaga adat sebagai pelestari adat dan budaya di Kabupten Gowa Lembaga inilah yang harus dipertahankan dan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Gowa .⁵⁵

Sejarah kerajaan memiliki kerajaan-kerajaan kecil yang disebut “bate” Sembilan diantaranya membentuk federasi yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Gowa. Selanjutnya kesembilan anggota federasi inilah yang dikenal dengan nama “Bate Salapang” secara harfiah, Bate salapang berarti “panji Sembilan” tetapi secara maknawi Bate salapang berarti “Dewan Hadat Sembilan”. Suatu dewan rakyat (Parlemen) yang bertugas mengangkat dan memberhentikan raja, serta “rapang” dan hukum adat yang disebut “ada”. Dalam kedudukannya sebagai Dewan Hadat, Bate

⁵⁵ Sirajuddin Ardan S.H , Wakil ketua Lembaga Adat Bate Salapang , wawancara 03 November 2016

Salapang tetap berperan sebagai kepala pemerintahan berotonomi penuh di wilayah asal masing-masing.⁵⁶

Masa kerajaan kini telah berakhir dan telah menjadi NKRI , selanjutnya masa kerajaan menjadi sumber sejarah. Dengan bersatunya seluruh daerah dan kerajaan ,Indonesia kini membagi beberapa provinsi dan kabupaten serta kota dan melahirkan pemerintahan otonomi daerah untuk mengurus segala hal yang bersangkutan tentang daerah tersebut . Lembaga Bate Salapang masih eksis namun hanya sebagai pelestari Adat dan budaya bukan lagi dalam bentuk Pemerintahan seperti pada masa kerajaan namun memiliki wewenang atas dasar untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya karna Bate Salapang merupakan Lembaga Adat atau Pemuka/pemangku adat yang mengurus dan bertujuan untuk mempertahankan Adat dan Budaya di Kabupaten Gowa.

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Drs. Haj Djamaluddin Aziz Paramma Dg. Djaga :

Bate Salapang rikamma-kamayya anne symbol mami tapi nia inja kewenanganna ngurusi maslah keraja'anga manna ikatte minne teruskan ada'-ada'na tau rioloa tau toangku ikatte sebagai ahli waris appeliharai pangadakkanga, bate salapang riolo angngangkaki raja iyatong panaungi,, sanna jaina fungsi-fungsi na anne Bate salapanga . Abbicara masalah Perda LAD anne angngapatong pammaretayya ri gowa mae pare perda LAD, na nia maki mo anne lembaga bate salapang anjalankangi pangadakkanga lestarikan adaka tenana ji di sikamma riolo angakana , katte anne sebagai pelestari mami . Perdana na angkaki bupati a'jari sombayya (raja) na angka kale-kalei kalenna padahal ikatte minne kullei angngangkaki jari sombayya punna kamma

⁵⁶ Drs. Haj Djamaluddin Aziz Paramma Dg.jaga , SYEKH YUSUF AL-MAKASSARY, (Perpusnas;Katalog Terbitan (KDT)). H.6-7

*inji riolo anne fungsina bate salapanga. Kata sombayya mi anjo tena di tarimai oleh Bate salapanga siangang keluarga kerajaan dan masyarakat*⁵⁷

*(Bate salapang yang sekarang ini hanya menjadi symbol belaka , namun masih memiliki kewenangan menjalankan adat dan kerajaan dia sebagai keluarga kerajaan merupakan pewaris adat bate salapang terdahulu dan akan memelihara adat , pada masa kerajaan mengangkat raja dan menurunkan . Berbicara masalah Perda LAD ini kenapa pemerintahan di Kabupaten melahirkan Perda Lad ini di padahal sudah ada lembaga bate salapang sebagai adat istiadat dan kami sekarang sebagai pelestari . Dalam perda dinyatakan Bupati di angkat menjadi sombayya , dia mrngakat sendiri dirinya menjadi sombayya padahal jika fungsi yang dulu kita jalankan maka kami yang berhak. Kata sombbya yang tidak kami terima selaku Bate salapang dan kerluarga Kerajaan serta masyarakat).*⁵⁸

Jika keinginan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan melahirkan sebuah produk Perda LAD sebagai wujud pelestari dan menghargai Adat dan Budaya yang berada pada tatanan daerah Kabupaten Gowa tentu mereka merujuk kepada para pemangku adat atau Lembaga adat yang ada di Kabupaten Gowa apakah mereka menginginkan sebuah aturan untuk mengatur dan mengurus masalah Adat dan budaya. Dalam hal ini tentu Pemerintah seharusnya memperoleh legitimasi dari beberapa pemangku Adat atau lembaga adat yang ada di Kabupaten Gowa. Pemerintah meminta sebuah legitimasi sebagai wujud menghargai pelestari adat dan budaya serta keturunan Kerajaan.

Seperti yang di kemukakan oleh Bapak A. Makmun Bau Tayang Karaeng Bontolangkasa keturunan raja Gowa 36 :

Saya tidak menerima surat panggilan dari Pemerintah Gowa untuk membahas LAD , tidak ada konsultasi kepada keluarga kami , jadi saya tidak tau jelas

⁵⁷ Drs. Haj Djamaluddin Aziz Dg. Djaga ,pemangku Lembaga Adat Bate Salapang wawancara pada Tanggal 03 November 2016

tentang bagaimana maksud Perda LAD , saya lebih banyak tau melalui media untuk masalah pemanggilan saat Ranperda tidak ada dan saya mengetahui tentang Perda LAD ini di media saja, berita yang tersebar itu bupati mau jadi somba.⁵⁹

Munculnya Perda LAD memang menimbulkan beberapa polemik yang di Kabupaten Gowa, berbagai pandangan/pendapat Tentang lahirnya LAD ini. Perbedaan dalam hal seperti ini merupakan hal yang memang seharusnya karna bentuk demokrasi kebebasan dalam berpendapat. Lahirnya Perda LAD yang kemudian mendapat tudingan dan cacian terhadap penguasa atau yang memiliki kekuasaan atas daerah Kabupaten Gowa.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sirajuddin Ardan, S.H Dg Sore .

Wakil Ketua Lembaga Adat Bate Salapang :

Bupati tanpa LAD dia sepenuhnya pemegang penuh kekuasaan Di Kabupaten Gowa kami tau itu tidak usah mengurus masalah Kerajaan dengan Perdanya apalagi dalam isinya mau di sebut Somba jelas-jelasmi dia itu sebagai penguasa di Kabupaten Gowa saya rasa ini tidak sesuai . Pada dasarnya dengan adanya LAD berarti mengkhianati Lembaga Adat Bate salapang yang diberikan legitimasi oleh Kesban dan memiliki dasar hukum kenapa meski ada dua Lembaga dalam daerah yang sama karna dalam LAD memiliki Lembaga yang sama dengan Lembaga Adat Bate Salapang dan tujuan yang sama . Bupati sangat haus akan kekuasaan ini buktinya sudah diangkat menjadi Bupati terpilih mau dia angkat lagi sebagai sombayya atau raja .⁶⁰

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hasan dg Ngemba selaku masyarakat

Gowa :

⁵⁹ A. Makmun Bau Tayang Karaeng Bontolangkasa keturunan raja Gowa 36, Wawancara Pada Tanggal 04 November 2016

⁶⁰ Sirajuddin Ardan S.H , Wakil ketua Lembaga Adat Bate salapang, wawancara pada Tanggal 3 November 2016

Bupati ta anne sanna dudu ngoana ero ngaseng mi ku sa'ring na allei jabatanga a'jari Bupati mi ero tongi poeng a'jari raja, ka iya tommo anjo keturunan rajayya a'jari raja, ka nia inja keturunanna raja gowa teamako ngoa dudu berupi jari bupati na pare mo masalah ri butta Goata. (Bupati sangat rakus akan kekuasaan ingin mengambil semua jabatan dia sudah menjadi Bupati dan menginginkan pula menjadi seorang Raja, seharusnya keturunan raja yang menjadi raja, karna masih ada keturunan Raja Gowa tidak perlu rakus,baru dilantik sebagai Bupati sudah menimbulkan masalah di tanah Gowa.⁶¹

Hal yang paling di tolak oleh beberapa masyarakat dalam Perda LAD ini adanya Kata *Sombayya* terdapat pada BAB I Pasal I ayat 3 : Bupati adalah Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan Fungsi dan peran Sombayya.⁶² Meski dalam hal ini LAD sebagai pelestari dan pengembangan serta pemeliharaan namun terjadi penolakan karena hal tersebut . Lahirnya Undang-Undang No. 32/2004 mengenai otonomi daerah, memungkinkan konsep pemerintahan desa dengan konsep pemerintahan adat hal ini dikuatkan lagi dengan dihasilkannya amandement kedua UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) Bab VI bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, kemudian dipertegas lagi Pasal 28 I Bab X A yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sebagai hak asasi manusia. Otonomi daerah menjadikan masyarakat lokal mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk melakukan kreasi sesuai dengan tradisi-tradisi yang berkembang di daerahnya.

⁶¹Hasan dg Ngemba selaku masyarakat Gowa, Wawancara , Pada Tanggal 4 November 2016

⁶² Lampiran Perda LAD Nomor 5 tahun 2016 Tentang Penataan Adat dan Budaya Daerah

Seperti halnya yang di kemukakan oleh Bapak Sirajuddin Ardan, S.H (Dg.

Sore) Wakil Ketua Lembaga Adat Bate Salapang :

Adat dan Istiadat dilindungi dalam UU dan Bahkan kami sebagai Lembaga adat yang ada di Kabupten Gowa ini telah di akui keberadaannya ada dasar hukum atau dilindungi oleh hukum serta di akui di Badan Kesban Kabupaten Gowa nah dalam hal ini berarti ada 2 Lembaga dalam satu naungan Lembaga Adat yang dilahirkan oleh Perda. Hal ini memalukan buat saya pribadi dan bahkan buat Kabupaten Gowa karna permasalahan Perda LAD menjadi permasalahan nasional dan menjadi hal yang hangat diperbincangkan Pemerintah yang baru melahirkan sebuah Perda yang menimbulkan konflik banyak gagasan seharusnya baik dalam hal pembangunan di Kabupaten Gowa masalah apakah yang jelas baik jangan mi mengeluarkan yang menimbulkan masalah

C . Faktor-faktor yang Menimbulkan Konflik di Kabupten Gowa dengan Lahirnya LAD

Kerajaan Gowa telah menjadi bukti sejarah masa lampau , Pemeritahan Raja kini telah hilang setelah beragabung dalam NKRI serta dengan adanya adanya Otonomi daerah. Masa Pemerintahan Raja kemudian beralih menjadi masa Pemerintahan Bupati setelah menjadi sebuah daerah Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan . Seiring dengan perkembangan Otonomi Daerah kemudian Kerajaan dibawah kendali Pemerintahan seorang Bupati , pihak Kerajaan dan Pemerintahan memiliki hubungan yang baik dan saling bekerja sama dalam membangun Kabupaten Gowa , berbeda halnya dengan Pemerintahan sekarang setelah Bupati terpilih Adnan Purichta IYL kemudian melahirkan sebuah Perda LAD yang menimbulkan hubungan Keluarga kerajaan/Pemangku Adat di Kabupaten Gowa rentang dan menimbulkan konflik di Kabupaten Gowa . Beberapa konflik yang terjadi di Kabupten Gowa :

1. Penolakan Ranperda

Konflik merupakan suatu hal yang tidak asing dalam kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu hal yang mustahil menghilangkan konflik serba hadir dalam kehidupan sosial pergaulan hidup manusia terdiri dari konflik antar pribadi, atau konflik personal, dan konflik antar kelompok. Hubungan antara konflik personal dengan konflik kelompok sangat berkaitan. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab seringkali konflik kelompok dipicu oleh konflik awal yakni konflik personal atau antar pribadi.⁶³ Dalam literature-literatur, konflik, sebagai gejala sosial serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga bersifat inheren. Artinya, konflik akan ada pada setiap ruang dan waktu. Artinya pula, dimana saja dan kapan saja selama kehidupan sosial masih ada, maka konflik.⁶⁴

Secara umum, konflik dapat diidentifikasi dengan melihat adanya pertentangan yang sangat potensial antara dua pihak. Potensial dimaksudkan sebagai kemampuan memiliki segenap daya dan upaya untuk memperoleh yang diinginkan . Konflik tidak akan meluas jika salah satu pihak memiliki potensi yang lebih kecil untuk memperoleh yang diinginkannya.

Memandang konflik yang terjadi di kabupaten Gowa ini bahwa konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dengan pihak Kerajaan , seperti yang di

⁶³ Muh. Irfan Idris, dan Nila Sastrawati, *Sosiologi Politik* , (Makassar: Alauddin Press,2010) h. 154

⁶⁴ Elly M. Setiadi Usman Kolip, *Pengantar sosiologi Politik*, (Jakarta : Prenamedia Group) h. 53

kemukakan oleh Bapak Sirajuddin Ardan, S.H , Wakil ketua Lembaga Adat Bate Salapang :

Kerusuhan yang terjadi ini antara Pemerintah Kabupten Gowa dengan pihak Kerajaan atau pihak Balla lompoo , Penolakan atas Ranperda saat itu ada kata raja dalam isi ranperda sehingga masyarakat yang kontra terhadap perda LAD mendemo dan membuat kericuhan .⁶⁵

Pada saat Ranperda LAD telah terjadi penolakan dikarenakan keluarga atau pihak kerajaan pada saat itu menolak keras atas Ranperda LAD ini dalam isi pada saat itu terdapat kata raja pada Bab 1 pasal 1 ayat ketiga menyatakan bahwa Bupati Sebagai ketua Lembaga Adat dan Bupati menjalankan fungsi atau peran Sebagai Raja, sehingga Kemudian Dengan adanya penolakan diubah kata Raja menjadi kata Sombayya . Isi dari perda , Bupati sebagai ketua Lembaga Adat dan Menjalankan fungsi-fungsi *Sombayya* ri Gowa, Kata *sombayya* dalam istilah kerajaan adalah Raja.

2. Adanya Kata Sombayya dalam Perda LAD

Penolakan perda diakibatkan dengan adanya kata Raja serta merupakan akar dalam sebuah konflik yang terjadi di Kabupaten Gowa. Keluarga kerajaan merasa tidak dihargai dengan hadirnya kata Raja dalam isi perda LAD, Setelah itu kemudian kata Raja diganti menjadi *Sombayya*.

Seperti apa yang di kemukakan oleh A. M Yusuf Harun, ST,. Msi selaku ketua komisi I DPRD Kabupaten Gowa, Sekretaris Pansus LAD :

Kata raja sudah diganti menjadi kata sombayya karena kata Raja ini di tolak oleh beberapa masyarakat dan kelompok masyarakat terutama dari Kubu A.Maddusila , kemudisan atas inisiatif bersama DPRD Gowa kemudian Kata

⁶⁵ Sirajuddin Ardan S.H , Wakil ketua Lembaga Adat Bate salapang, wawancara pada Tanggal 3 November 2016

Raja diganti menjadi Sombayya dan Perda LAD disahkan, selanjutnya yang harus di pahami bahwa Bupati sebagai Ketua LAD dan menjalankan Fungsi-fungsi Sombayya bukan sebagai sombayya itu harus di pahami .⁶⁶

Akar dari sebuah konflik yang terjadi di Kabupaten Gowa Kata Raja dan Sombayya, Bupati berperan sebagai Sombayya menjalankan fungsi-fungsi nya. Istilah pada masa kerajaan Gowa kedudukan Raja dan Sombayya adalah sama hanya saja penyebutannya yang berbeda. Hal tersebut kemudian dianggap terjadi kekeliruan, Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Drs.H. Hasan Abdullah (Dg. Puang) anggota Lembaga Adat Bate Salapang :

Raja sikamma tongji nikanayya somba jari sombayya iya tongji raja , Jari manna ngapa singkammaji cuman riolo ka tunduk ki jadi somba antu nyomba berarti menyembah atau tundukki mae ri rajayya jari nikana mo somba , punna LAD e anne nia tong nikanayya somba, inai na ngangkaki kalenna tongji , iyami minne kata sombayya ri tolak , kana-kananna sombayya riolo “angkanayya tenamo somba ribokoangganna na nakke punna paeng nia somba ribokoaganggu nia antu sallang nu cini “. Termasuk minne anne kutaeng karicuanga pammarentata na masyarakat, ricuna na ji punna teai dipinawang pammarentata, .

(Raja sama seperti somba , somba sama seperti raja jadi meskipun bagaimana sejarahnya tetap sama dan pada saat masa Kerajaan disebut somba karena kita tunduk pada raja dan patuh terhadap raja makanya disebutlah somba , Perda LAD ini terdapat kata Somba siapa yang yang mengakat sebagai Somba selain dirinya , inilah kata somba yang menjadi penolakan sebab ada kata orang terdahulu “mengatakan bahwa tidak ada lagi somba setelahnya walaupun ada maka akan melihat sesuatu sehingga menimbulkan kericuhan antara Pemerintah dan Masyarakat, karna tidak mengikuti sebuah keinginan Pemerintah)⁶⁷

⁶⁶A. M Yusuf Harun, ST., Msi selaku ketua komisi I DPRD Kabupaten Gowa, Sekretaris Pansus LAD, Wawancara, Pada Tanggal 30 November 2016.

⁶⁷Drs.H. Hasan Abdullah (Dg. Puang) Anggota Lembaga Adat Bate Salapang , Wawancara pada Tanggal 03 November 2016

Dengan adanya potensial antara kedua pihak untuk mencapai apa yang diinginkan termasuk kekuasaan dalam dalam Perda LAD kedudukan sebagai Raja atau *Sombayya Ri Gowa*. Istilah konflik dalam politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan revolusi, kerusuhan, kudeta. Konflik dianggap sebagai benturan kepentingan dan keinginan biasa berhubungan dengan kekuasaan, dimana kedua kelompok memiliki kepentingan dan keinginan yang sama. Dalam memperoleh kekuasaan, masing-masing memiliki cara yang sama ataupun berbeda. Salah satu yang mungkin dipilih adalah dengan cara kekerasan.⁶⁸

Seperti apa yang di kemukakan oleh Bapak Sirajuddin Ardan, S.H , Dg. Sore, Wakil Ketua Lembaga Adat Bate Salapang :

Apa tujuan perda ini dilahirkan, secara tidak langsung meski tanpa Perda LAD ini Pemerintah tetap Raja atau penguasa di Kabupaten Gowa jadi kalau disebut Bupati sekaligus Raja atau somba ri Gowa dan tentu ini tidak layak ataukah mau mengambil kekuasaan penuh dikabupaten Gowa Kerajaan yang sekarang kan sisa symbol dan gelar Raja pun sisa symbol semata tidak usah Ada perda LAD ini yang menimbulkan kerusuhan di Kabupaten Gowa , Ataukah tujuan untuk menjatuhkan atau mangkudeta keluarga Kerajaan dan Lembaga adat yang ada sekarang , seharusnya Pemerintah mengeluarkan ide-ide yang lebih bagus untuk Kabupaten Gowa, bukan melahirkan kericuhan ,liat mi bagaimana arogan Pemerintahanta pada saat masyarakat dan keluarga kerajaan ingin mengadakan acara adat kalompoang (pencucian alat pusaka) mereka dilempari oleh satpol PP dan Preman-preman Pemerintah dia sendiri yang memulai dan menginginkan kerusuhan terjadi .⁶⁹

⁶⁸ Muh. Irfan Idris, dan Dra. Nila Sastrawati , *Sosiologi Politik*, (Makassar: Alauddin Press,2010) h. 156

⁶⁹ Sirajuddin Ardan S.H , Wakil ketua Lembaga Adat Bate salapang, wawancara pada Tanggal 3 November 2016

3. Keluarga Kerajaan Dan Pemangku Adat tidak di libatkan dalam acara Adat Kalompoang

Seperti apa yang telah dikemukakan di atas bahwa konflik yang terjadi dengan Lahirnya LAD di picu dari pihak pemerintahan Gowa itu sendiri , melakukan pelemparan terhadap terhadap masyarakat dan Keturunan Kerajaan pada saat akan melakukan Kalompoang atau Gaukang , dalam hal ini masyarakat pun resah dengan sikap arogansi Pemerintahan Kabupaten Gowa.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Basri Dg. Baso Selaku Masyarakat Gowa yang tinggal disekitar Balla Lompoa :

Satpol PP dan Premanna pammarenta appariolo nyambila mae ri taunna kerajaan nampanna nia ricu riolo mae rioloa talebbakai ricu punna acara Kalompoanna Balla Lompoa, ka ero ngasengmi q sa'ring nakuasai pammarentata anne .

(Satpol PP dan Preman yang lebih dulu melempari Para massa Kerajaan sebelumnya tidak pernah terjadi kerusuhan setiap acara Adat Kalompoang(pencucian alat pusaka) Balla Lompoa , Pemerintahan sangat ingin menguasai sepenuhnya⁷⁰

Seperti apa yang telah dikemukakan di atas bahwa Sepenuhnya Pemerintahan Kabupaten Gowa, Bahwa Pemerintah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi dan memiliki kekuasaan . Dalam hal ini telah jelas dalam UU Desentralisasi no. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

⁷⁰ Basri Dg. Baso Selaku Masyarakat Gowa yang tinggal disekitar Balla Lompoa, Wawancara pada Tanggal 03 November 2016

pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam hal ini berbeda bahwa budaya dan Adat harus dilindungi dan hak-hak budaya .

Situasi Konflik berada pada posisi menang- kalah, atau menang-menang-menang . Chon menjelaskan bahwa situasi menang kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pada situasi konflik semacam itu, kompromi atau kesepakatan sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan segala-galanya. Kompromi atau kesepakatan sangat sulit dilakukan bila yang di pertentangkan menyangkut nilai-nilai, harga diri, sampai dengan perebutan jabatan tertentu.⁷¹

Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Drs.H. Hasan Abdullah (Dg. Puang) anggota Lembaga Adat Bate Salapang :

Permasalahan yang terjadi ini di Kabupten Gowa menyangkut masalah harga diri jadi dipertahankan karna pemerintah ingin mengambil alih masalah kerajaan tentu pihak kami harus melawan apalagi kubu A.Maddusila merasa tidak dihargai lagi serta keluarga kerajaan karna LAD ini tidak mengakui mi ini semua seolah-olah ingin menghilangkan semua unsur-unsur kerajaan yang dulu seperti Bate Salapang di sisi lain A.Maddusila dinobatkan sebagai Raja Gowa ke-37 disisi lain Bupati mengangkat dirinya jadi Raja atas Perda LADnya masing-masing mau jadi raja tidak ada yang mau mengalah .⁷²

Melihat konflik yang terjadi di Kabupaten gowa siapa yang menang maka dia mendapatkan kedudukan sebagai *sombayya*. Konflik menang-menang ialah situasi

⁷¹ Muh. Irfan Idris, dan Nila Sastrawati , *Sosilogi Politik* , (Makassar: Alauddin Press,2010) h. 159-160

⁷²Drs.H. Hasan Abdullah (Dg. Puang) Anggota Lembaga Adat Bate Salapang , *Wawancara* pada Tanggal 03 November 2016

konflik dimana pihak-pihak yang terlibat masih memungkinkan untuk mengadakan kompromi atau kerjasama sehingga semua kelompok akan menikmati bagian dari konflik tersebut. Ciri khusus dari konflik ini adalah masih memungkinkan adanya kompromi atau kerjasama. Misalnya, dalam pembahasan peraturan-peraturan tertentu, atau pembahasan anggaran.

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat aktif artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya dalam Negara Demokrasi perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar .

Lewis Coser melihat konflik memiliki fungsi positif ketika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Seorang ilmuwan sosiologi konflik lainnya menyatakan, bahwa sesungguhnya konflik itu berkaitan dengan tujuan-tujuan dari seseorang maupun kelompok dalam masyarakat. Tujuan itu diperjuangkan tatkala bergesekan dengan tujuan orang dan kelompok lain.⁷³

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sirajuddin Ardan, S.H , (Dg Sore) selaku Wakil Ketua Lembaga Adat Bate Salapang :

Di sinimi kita lihat apakah masyarakat peduli terhadap sejarah-sejarah Kerajaan dengan melawan pemerintahan yang ingin menjadi somba, masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap Kerajaan, masyarakat peduli akan adatnya dan harus ditekankan inai ero nipakasiri(siapa yang ingin dipermalukan) tentu harus ki melawan kalau memang ini menyangkut Kerajaan

⁷³Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik*, (Jakarta: Prenamedia Group), h. 49

makanya A. Maddusila ini menggerakkan massa untuk melawan dalam hal penolakan atas Perda LAD , dalam hal ini keluarga kerajaan merasah di permalukan dengan adanya LAD, seoloah-olah ingin menghilangkan semua unsure-unsur kerajaan.⁷⁴

Konflik yang terjadi di Kabupaten Gowa terkait masalah LAD, konflik yang antar kelompok yaitu Pemerintah dan Pihak Kerajaan. Hal ini sangat hangat diperbincangkan dan mendapatkan perhatian dari berbagai daerah dan menjadi permasalahan Nasional. Dalam istilah makassar tentu ketika menyangkut masalah hak dan harga diri maka harus berjuang bahkan siap untuk mati karna dalam istilah Budaya Gowa/Makassar adanya Budaya *siri'*, siri inilah yang harus dipertahankan dan konflik yang terjadi ini menyangkut persoalan siri' dari pihak Kerajaan Gowa/keturunan Raja gowa karna merasa hak-haknya akan terkikis dengan adanya LAD maka pihaknya melakukan perlawanan dan menimbulkan konflik antara Pemerintah .

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muh Jufri Tenri Bali Daeng Pali, Sejarawan dan Pengamat Budaya Balla Lompoa Gowa

Siri biasanya dipakai dalam bugis makassar sebagai budaya mempertahankan diri istilahnya teai nipakasiri nakipaenteng siri'(tidak ingin dipermalukan maka harus mempertahankan) istilah Siri juga bisa dikatakan sebagai memanusiakan manusia, dalam melihat Konflik yang terjadi di Kabupaten Gowa ini dengan adanya Perda LAD tentu bisa dikaitkan. Karna A.maddusila merasa nipaka SIRI'(dipermalukan) maka dia melakukan perlawanan, karna bajika kangngangi mate paentenga siri' nadipakasirika (lebih baik mati karna tidak ingin malu di bandingkan harus menanggung malu) nakana tau toayya riolo teako lanre ma'boko punna nia tau napakasiri allei leko puli(menurut

⁷⁴Sirajuddin Ardan, S.H , Wakil ketua Lembaga Adat Bate salapang, wawancara pada Tanggal 3 November 2016

*orang terdahulu jangan la berbalik badan jika ada seseorang yang akan membuat mu malu , balas sesuai perbuatannya).*⁷⁵

Melihat konflik yang terjadi di Kabupaten Gowa menyangkut persoalan siri' kubu keluarga kerajaan serta pemangku adat Kabupaten Gowa merasa nipakasiri' (Permalukan) sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap Pemerintahan Kabupaten Gowa dan merasa bahwa mereka tidak dihargai dengan lahirnya Perda LAD.



⁷⁵Wawancara dengan Bapak Muh Jufri Tenri Bali Daeng Pali, Sejarawan dan Pengamat Budaya Balla Lompoa Gowa pada tanggal 29 November 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa, selanjutnya di singkat LAD Kabupaten Gowa adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarannya atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat dan budaya di Kabupaten Gowa.

1. Respon Pemerintahan dan Pemangku adat di Kabupaten Gowa terhadap lahirnya Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 tentang penataan adat dan budaya daerah.

Respon pemerintah terhadap LAD. Lahirnya perda LAD kemudian menimbulkan berbagai pro dan kontra antara keluarga kerajaan dan pemerintah daerah, meski terjadi pro dan kontra Pemerintahan tetap setuju atas perda LAD dan menjalankan Perda sesuai dengan apa yang telah disahkan. LAD mengakibatkan terjadinya kondisi dilematis bagi beberapa aparatur birokrasi pasalnya di satu sisi kontra dengan LAD namun di sisi lain tak mampu berbuat banyak dikarenakan harus tunduk dan patuh terhadap atasan (bupati).

Respon pemangku Adat dan Budaya Kabupaten Gowa menyatakan bahwa Perda LAD ini tidak layak untuk diterapkan sebagaimana

keinginan dari pemerintahan Kabupaten Gowa. Hal yang paling ditolak dalam perda LAD adalah adanya kata *sombaya* pada BAB I Pasal I ayat 3 yang berbunyi bupati adalah Bupati Gowa sebagai Ketua lembaga adat Daerah yang menjalankan fungsi dan peran *Sombayya*

2. Faktor-faktor Yang Menimbulkan Konflik Terkait Dengan Terbitnya Perda LAD di Kabupaten Gowa

konflik terjadi diakibatkan atas penolakan Perda LAD dikarenakan keluarga atau pihak kerajaan pada saat itu menolak keras. Hal yang paling utama atas penolakan dan akar terjadinya konflik di Kabupaten Gowa adanya Kata *Sombayya/Raja* .Konflik yang terjadi dengan Lahirnya LAD di picu dari pihak pemerintahan Gowa itu sendiri, melakukan pelemparan terhadap terhadap masyarakat dan Keturunan Kerajaan pada saat akan melakukan Kalompoang atau Gaukang (Pencucian alat dan benda pusaka), dalam hal ini masyarakat pun resah dengan sikap arogansi Pemerintahan Kabupaten. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat aktif artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya dalam Negara Demokrasi perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Konflik yang

terjadi di Kabupaten Gowa ini telah menjadi masalah nasional yang hangat diperbincangkan .

B. Implikasi

Adapun saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Gowa dapat meredam Konflik dengan Keluarga kerajaan gowa.
2. Masyarakat Kabupaten Gowa kiranya tidak mudah terprovokasi oleh pihak tertentu .
3. Pemerintah seharusnya mengeluarkan ide-ide yang bersifat membangun Kabupten jauh lebih lebih baik
4. Penelitian ini untuk menambah wawasan melihat fenomena yang terjadi di Kabupten Gowa dengan lahirnya Perda LAD DAN dan untuk mengembangkan keilmuan dalam hal sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Toha putra*, Semarang : PT Toha Putra, 2007
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan daerah secara langsung* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Alamsyah, Anggriani, *Etika Politik* ,Makassar: Alauddin University Press 2012
- Aziz Paramma, Djamaluddin , Syekh Yusuf Al-Makassary, Perpunas; Katalog Terbitan (KDT)
- Budiardjo, Mirriam , *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Budiyono, Kabul, *Teori Dan Filsafat*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Creswell, Jhon W, *Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012
- Karim, Syahrir, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*, Makassar : Alauddin University Press 2012
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Kualitatif, edisi Revisi*, Bandung : Rosda Karya, 2014
- Philipus Ng, *Sosiologi Dan Politik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Jalaluddin, Rahmat *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999
- Idris, Muh. Irfan dan Sastrawati, Nila *Sosiologi Politik*, Makassar : Alauddin press 2010
- Jurdi, Syarifuddin, *Ilmu politik Profetik*, Makassar : Laboratorium Ilmu Politik Uin Alauddin, 2015
- Kolip, Usman dan Setiadi, Elly M, *Pengantar Sosilogi Politik*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2013
- Salihima, Syamsuez *Peta Politik Di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi*, Makassar : Alauddin University Press, 2014

Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik* : Jakarta : Prenadamedia Group 2010

Subandi, Ahmad, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Bulan Bintang. 1982

Soenarjo, dan S. Soenajo Djoenarsih, *Himpunan Istilah Komunikasi*, Yogyakarta: Liberty. 1983

Walsito, Bimo, *Psikologi Umum*, Yogyakarta: UGM. 1999

Skripsi:

Hasni Rabbi, Hubungan Lembaga Adat Dengan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan di Tana Toraja, *SKRIPSI*, (Makassar: Ilmu Politik fispol, Unhas, 2012)

Tesis:

Agus Jaelani Mursidi, Keberadaan Lembaga Adat Dalam Konsep Otonomi Desa Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi tentang Lembaga Adat “Perdikan” di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batan), *TESIS Ilmu Hukum*, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Jurnal:

A. Zarkasi, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah, *Jurnal Ilmu hukum*, vol 3, Nomor 2, Agustus-Oktober 2014. Diakses 11/09/19. Pukul 23.30 Wita

Rudyanto, Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat, *skripsi*, Padang: Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2012.

Kamaruddin, Model Penyelesaian Konflik, *jurnal Ilmu Hukum* , vol 21, No 1 , Mei 2013

Internet:

<http://makassar.tribunnews.com/2016/03/29/breaking-news-kubu-pendukung-ranperda-bupati-jadi-raja-gowa-datangi-dprd-gowa>

<https://islamislagic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin>

<http://makassar.tribunnews.com/2016/08/15/tak-bisa-jadi-raja-gowa-kini-adnan-sah-jadi-somba-gowa?>



Wawancara Muh. Taslim S.H., M.H Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekda
Kabupaten Gowa tanggal 04 November 2016



Wawancara Drs. Rimba Alam A. Pangerangi. M.Si Kepala Kabag Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Sekda Kabupaten Gowa, Pada Tanggal 04 November 2016



Wawancara A. M Yusuf Harun, ST,. Msi selaku ketua komisi I DPRD Kabupaten Gowa, Sekretaris Pansus LAD, Pada Tanggal 30 November 2016



Wawancara Sirajuddin Ardan S.H , Wakil ketua Lembaga Adat Bate Salapang , 03 November 2016



Wawancara Drs. Haj Djamaluddin Aziz Dg. Djaga ,pemangku Lembaga Adat Bate Salapang wawancara pada Tanggal 03 November 2016



Wawancara Drs.H. Hasan Abdullah (Dg. Puang) Anggota Lembaga Adat Bate Salapang pada Tanggal



Wawancara, A. Makmun Bau Tayang Karaeng Bontolangkasa keturunan raja Gowa 36, Pada Tanggal 04 November 2016



Wawancara, Hasan dg Ngemba selaku masyarakat Gowa, Pada Tanggal 4 November

RIWAYAT HIDUP



SUNARDI, Lahir di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan Pada Tanggal 17 Juni 1993. Anak ke 5 dari pasangan ayah bernama Dg Rajja dan ibu bernama Dg Baji, dari 5 bersaudara.

Pendidikan yang pernah di tempuh, SDN PANNARA Kota Makassar Tahun 2000-2006, SMPN 20 Makassar Tahun 2006-2009, SMA MAKASSAR MULYA Tahun 2009-2012. Dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2012 serta terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik dan selesai pada tahun 2017.

Penulis dapat menyelesaikan pendidikan atas limpahan rahmat Allah Swt serta dukungan dan doa dari kedua orang tua dengan memilih Judul skripsi “ Respon Pemangku Adat Terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat Dan Budaya Daerah di Kabupaten Gowa”.